



Pemerintah Kota Bukittinggi



WALIKOTA BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya, penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Kota Bukittinggi Tahun 2016 dapat selesai tepat waktu. Penyusunan LKIP sebagai wujud Implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.



M. RAMLAN NURMATIAS, SH

WALIKOTA BUKITTINGGI

Substansi laporan ini merupakan wujud Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan dengan menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas serta sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan kepada Masyarakat dan kepada Pemerintah sesuai dengan amanat yang diterima.

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 merupakan Laporan Kinerja Tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021. Materi laporan antara lain menguraikan capaian sasaran yang diukur berdasarkan Indikator



Pemerintah Kota Bukittinggi

Kinerja Utama yang dituangkan dalam RPJMD Kota Bukittinggi dengan target yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016.

Secara keseluruhan penyelenggaraan pemerintahan di Kota Bukittinggi telah banyak membuahkan hasil, namun disadari masih ada beberapa indikator kinerja yang belum maksimal pencapaiannya. Keberadaan laporan ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih efektif dan efisien, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, manajemen keuangan dan koordinasi pelaksanaannya serta monitoring evaluasi sebagai umpan balik untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja serta peningkatan kinerja dan komitmen bagi seluruh aparatur Pemerintah Kota Bukittinggi dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan.

Bukittinggi, Maret 2017

WALIKOTA BUKITTINGGI

Dto

M. RAMLAN NURMATIAS, SH



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 merupakan laporan kinerja tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi 2016-2021. Rencana dan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 yang terdiri dari 26 sasaran strategis yang pencapaiannya diukur dengan 46 indikator kinerja utama.

1. Keberhasilan/Kegagalan Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

Berdasarkan analisis dan evaluasi capaian indikator kinerja sasaran strategis yang telah dijelaskan dalam Bab III, keberhasilan/kegagalan Pemerintah Kota Bukittinggi dalam melaksanakan misi yang diemban dapat dijelaskan sebagai berikut:

Misi 1 “Mengembangkan dan memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia Usaha, dan masyarakat”.

Pencapaian Kinerja, 4 (empat) sasaran strategis misi 1 tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 7 (tujuh) indikator kinerja utama adalah sebesar 104%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1.1 Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong .	jml	72	70	97



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
		1.2 Perusahanan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	%	70	60	85
2	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	2.1 Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda/kepemudaan	jml	52	52	100
		2.2 Sanggar seni yang aktif	jml	7	8	114
3	Meningkatnya event olahraga generasi muda	3.1 Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda / Kepemudaan	jml	7	7	100
4	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	4.1 Kelompok/organi sasi Remaja Mesjid yang aktif dalam bidang keagamaan	jml	3	4	133
		4.2 Jumlah Event keagamaan	jml	3	3	100
Rata-rata Capaian 7 indikator						104

Dari tabel diatas berdasarkan Misi I Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sudah meningkat dengan indikator kinerja, Jumlah pembangunan fisik



- yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong dengan tingkat capaian kinerja sebesar 97%, dan Perusahan / dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 85%.
2. Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya juga telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda/kepemudaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100% dan Sanggar seni yang aktif dengan tingkat capaian kinerja sebesar 114%.
 3. Meningkatnya event olahraga generasi muda dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda/ Kepemudaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
 4. Meningkatnya fungsi rumah ibadah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Kelompok/organisasi Remaja Masjid yang aktif dalam bidang keagamaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 133%, dan Jumlah Event keagamaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Misi II “Meningkatkan Kinerja Pemerintah Secara Profesional, Transparan, Akuntabel, dan Mempunyai Jiwa Kewirausahaan”

Pencapaian Kinerja, dua sasaran strategis misi II tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 4 (empat) indikator kinerja utama adalah sebesar 108%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas	1.1 % pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	%	50	63,65	127



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	lembaga pemerintahan	1.2	Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	Nilai	LPPD Rangking 65, LKIP C	63 150
		1.3	% capaian program pembentukan peraturan daerah	%	19	13 68
2		Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN	2.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP
Rata-rata Capaian 4 indikator						108

Dari tabel diatas berdasarkan Misi II Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan sudah meningkat dengan indikator kinerja, % pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 127%, Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96% dan 150%, dan % capaian program pembentukan peraturan daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 68%.
2. Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN telah dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.

Misi III “Meningkatkan Pembangunan, Penataan dan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan”

Pencapaian Kinerja, 7 sasaran strategis misi III tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 11 indikator kinerja utama sebesar 112%. Sesuai klasifikasi



penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan sangat baik.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terpenuhinya RTH Kota	1.1 % RTH Publik	%	8	8	100
2	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	2.1 % air minum layak	%	93	78	83
		2.2 % sanitasi layak	%	95	72,72	76
3	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	3.1 Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	55	85	154
		3.2 Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	50	59	118
4	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	4.1 Benda cagar budaya yang lestari	%	5	6	120
5	Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	5.1 Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	jml	1	1	100
6	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	6.1 Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	%	81	100	123
		6.2 Fasilitas Keselamatan Jalan	%	71	70	98



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
		6.3 Jalan berkondisi baik	%	86	85,67	99,6
7	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat dan terhadap bencana	7.1 Fasilitas kebencanaan	%	60	71	118
Rata-rata Capaian 11 indikator						112

Dari tabel diatas berdasarkan Misi III Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Terpenuhinya RTH Kota di Kota Bukittinggi pada tahun 2016 sudah meningkat dengan indikator kinerja, persentase RTH Publik dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
2. Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh) juga telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Persentase air minum layak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 83%, dan Persentase sanitasi layak dengan tingkat capaian kinerja sebesar 76%.
3. Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan tingkat capaian kinerja sebesar 154%, dan Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 118%.
4. Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB) telah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Benda cagar budaya yang lestari dengan tingkat capaian kinerja sebesar 120%.



5. Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
6. Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum dengan tingkat capaian kinerja sebesar 123%, Fasilitas Keselamatan Jalan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 98%, dan Jalan berkondisi baik tingkat capaian kinerja sebesar 99%.
7. Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat dan terhadap bencana dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Fasilitas kebencanaan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 118%.

Misi IV “Mengembangkan Sistem Ekonomi Perkotaan Secara Lebih Berdaya Guna”

Pencapaian Kinerja, 6 sasaran strategis misi IV tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 6 (enam) indikator kinerja sebesar 97%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Berkembangnya koperasi	1.1 Jumlah Koperasi sehat	Jml	12	13	108
2	Berkembangnya usaha mikro	2.1 Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	Jml	5	5	100
3	Berkembangnya investasi	3.1 Jumlah Investasi	Rp Triliun	1,884	1,771	93



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
4	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	4.1 Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)	jml	5	5	100
5	Meningkatnya lapangan kerja	5.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.84	6,04	96,5
6	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	6.1 Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp	34.758.804.463	30.709.690.231	88
Rata-rata Capaian 6 indikator						97

Dari tabel diatas berdasarkan Misi IV Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Berkembangnya koperasi pada tahun 2016 sudah meningkat dengan indikator kinerja, Jumlah Koperasi sehat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108%.
2. Berkembangnya usaha mikro juga telah dapat dilaksanakan dengan baik dimana dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.
3. Berkembangnya investasi dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah Investasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 93%.
4. Berkembangnya Industri Kecil Menengah dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%.



5. Meningkatnya lapangan kerja dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka dengan tingkat capaian kinerja sebesar 96%.
6. Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah penerimaan pajak daerah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 88%.

Misi V “Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa Serta Kesejahteraan Sosial Masyarakat”

Pencapaian Kinerja, 7 (tujuh) sasaran strategis misi V tahun 2016 yang diukur dengan capaian rata-rata 18 (delapan belas) indikator kinerja sebesar 102%. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan termasuk kategori keberhasilan **sangat baik**.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya kunjungan wisatawan	jumlah kunjungan wisatawan	Jml	483.950	499.806	103
2	Meningkatkan mutu pendidikan	Harapan lama sekolah	Tahun	14,7	14,92	79
		Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	10,85	10,79	99
		APK PAUD (3 – 6 TH)	%	86,00	79	91
		% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	72,88	79	108
		% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	54,50	73	135
		% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	%	63,60	82	130
		% Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK	%	37,20	42	113



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
3	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,13	101
		Puskesmas yang terakreditasi	Jml	2	2	100
		Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	81	85	104
4	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarsutamaan gender dan perlindungan anak	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,71	1,71	100
		Tingkat Kemiskinan	%	4,23	5,46	71
		Indek Pemberdayaan gender	%	70,84	91	129
		Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	%	80	112	140
5	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Rp Triliun	2.338	1.844	78
6	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragama, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	84,1	83,9	99,7
7	Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	Jumlah kasus pelanggaran gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	Kasus	650	657	101
Rata-rata 18 indikator sasaran						104



Dari tabel diatas berdasarkan Misi IV Pemerintah Kota Bukittinggi dapat dijelaskan bahwa:

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan pada tahun 2016 sudah meningkat dengan indikator kinerja, jumlah kunjungan wisatawan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 103%.
2. Meningkatkan mutu pendidikan juga telah dapat dilaksanakan dengan baik dimana dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Harapan lama sekolah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 79%, Angka Rata Rata Lama Sekolah dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99%, APK PAUD (3 – 6 TH) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 91%, % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD dengan tingkat capaian kinerja sebesar 108%, % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP dengan tingkat capaian kinerja sebesar 135%, % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA dengan tingkat capaian kinerja sebesar 130%, dan % Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK dengan tingkat capaian kinerja sebesar 113%.
3. Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Angka Harapan Hidup dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101%, Puskesmas yang terakreditasi dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, dan Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat dengan tingkat capaian kinerja sebesar 104%
4. Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Laju Pertumbuhan Penduduk dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100%, Tingkat Kemiskinan dengan tingkat capaian kinerja sebesar 71%, Indek Pemberdayaan gender dengan tingkat capaian kinerja sebesar 129%, dan Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk dengan tingkat capaian kinerja sebesar 140%.
5. Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran dengan tingkat capaian kinerja sebesar 78%.



6. Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragama, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Skor pola pangan harapan (PPH) dengan tingkat capaian kinerja sebesar 99,7%.
7. Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari capaian indikator kinerja Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani dengan tingkat capaian kinerja sebesar 101%.

2. Permasalahan

Dalam peningkatan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi kedepan masih ditemui beberapa permasalahan, antara lain sebagai berikut:

- a. Kualitas perencanaan pembangunan daerah, penganggaran, penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih kurang. Hal ini dapat dilihat dari keselarasan dan sinkronisasi antara dokumen perencanaan, penganggaran, dan dokumen Sistem AKIP belum terbangun secara baik. Sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan pada dokumen perencanaan belum seluruhnya memenuhi persyaratan dan kriteria sasaran dan indikator kinerja yang baik.
- b. Komitmen pejabat pimpinan dan pegawai dalam melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja belum terbangun secara baik. Hal ini dapat diamatidari penerapan pola pikir dan budaya kerja yang berorientasi hasil dalam setiap program dan kegiatan yang akan dilaksanakan belum sepenuhnya terlaksana dengan baik.
- c. Kompetensi SDM Aparatur masih kurang.

3. Langkah-Langkah Tindak Lanjut

- a. Meningkatkan kualitas dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Bukittinggi 2016-2020. Secara tahunan, menyelaraskan dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran dengan dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, mulai dari penyusunan Renja



SKPD, RKPD, Perencanaan Anggaran dan Penetapan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dan SKPD Kota Bukittinggi.

- b. Melakukan pembinaan untuk peningkatan komitmen pejabat pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi untuk melaksanakan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara sungguh-sungguh, konsisten dan berkelanjutan. Pembentukan komitmen pejabat pimpinan dan pegawai dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ini sampai menjadi budaya kerja birokrasi di Kota Bukittinggi.
- c. Melakukan peningkatan kompetensi SDM Aparatur dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah secara terencana, konsisten dan berkelanjutan. Peningkatan kompetensi SDM Aparatur dilaksanakan mulai dari pejabat pimpinan sampai kepada pegawai yang secara teknis melaksanakan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di SKPD Kota Bukittinggi.

Daftar Isi

Halaman

Kata Pengantar

Ikhtisar Eksekutif

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

1.1	Latar Belakang	I-1
1.2	Pemerintahan Kota Bukittinggi	I-1
1.3	Sejarah Singkat Kota Bukittinggi	I-6
1.4	Isu Strategis Pemerintah Kota Bukittinggi	I-8
1.5	Dasar Hukum	I-20
1.6	Maksud dan Tujuan	I-22
1.7	Sistematika Penyajian	I-23

Bab II Perencanaan Kinerja

2.1	Visi dan Misi	II-1
2.2	Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2015	II-3

Bab III Akuntabilitas Kinerja

3.1	Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja	III-1
3.2	Hasil Pengukuran Kinerja	III-2
3.3	Analisis Capaian Kinerja	III-6

Bab IV Penutup

	Penutup	IV-1
--	---------	------

Lampiran

BAB 1

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik (good governance) dalam sistem manajemen pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi. Sistem manajemen pemerintahan diharapkan berfokus pada peningkatan akuntabilitas serta sekaligus peningkatan kinerja yang berorientasi pada hasil (outcome). Implementasinya diterapkan dalam bentuk Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), untuk menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel, efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya.

Akuntabilitas merupakan kata kunci dari sistem tersebut, yang dapat diartikan sebagai perwujudan dari kewajiban seseorang atau instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban dan berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodic. Akuntabilitas yang diinginkan Pemerintah tersebut tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi ini merupakan implementasi dari kebijakan nasional dan daerah, sebagai laporan penerapan tahun pertama RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 - 2021. Keberadaan LKIP ini akan menjadi indikator untuk mengukur keberhasilan pemerintah Kota Bukittinggi berdasarkan Perjanjian target kinerja yang telah ditetapkan dan ditandatangani Walikota Bukittinggi dan dilaksanakan oleh SKPD terkait di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi.

1.2. PEMERINTAHAN KOTA BUKITTINGGI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan



Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013, dan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi, maka Susunan Organisasi Pemerintah Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, membawahi:
 - a. Asisten Administrasi Pemerintahan Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Pemerintahan Umum.
 - 2) Bagian Organisasi
 - 3) Bagian Hukum dan Hak Azasi Manusia
 - b. Asisten Administrasi Perekonomian, Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahi:
 - 1) Bagian Perekonomian
 - 2) Bagian Pembangunan
 - 3) Bagian Kesejahteraan
 - c. Asisten Administrasi Umum, membawahi:
 - 1) Bagian Umum dan Perlengkapan
 - 2) Bagian Keuangan
 - 3) Bagian Hubungan Masyarakat
2. Sekretariat DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD
3. Inspektorat Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur,

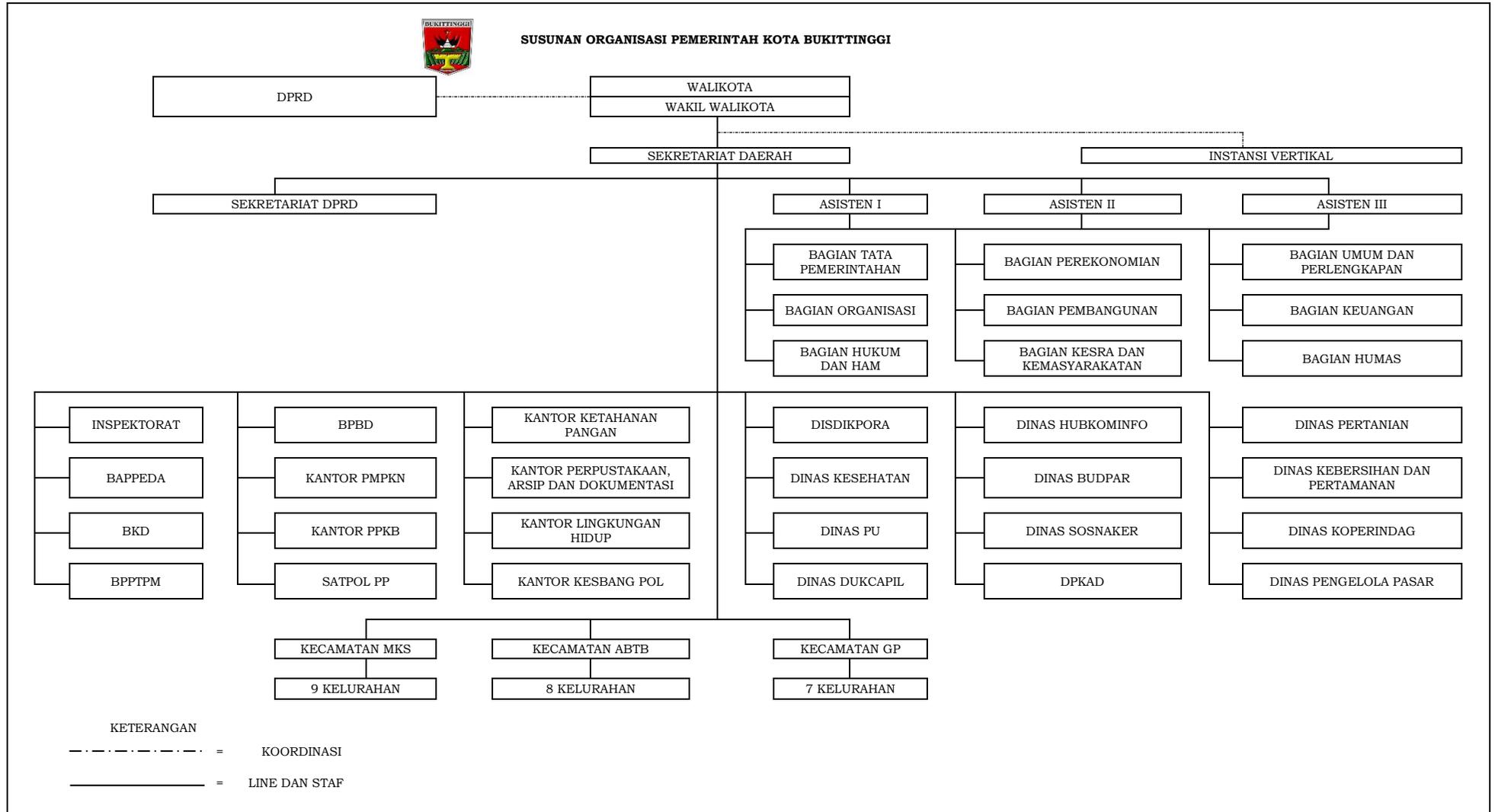


4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan,
5. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal, dipimpin oleh seorang Kepala Badan,
6. Badan Kepegawaian Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala Badan
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dipimpin oleh Kepala Pelaksana Badan
8. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
9. Dinas Kesehatan, Dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
10. Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
11. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
12. Dinas Pekerjaan Umum, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
13. Dinas Kebersihan dan Pertamanan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
14. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
15. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
16. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
17. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
18. Dinas Pengelolaan Pasar, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
19. Dinas Pertanian, dipimpin oleh Seorang Kepala Dinas,
20. Kantor Lingkungan Hidup, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor,
21. Kantor Ketahanan Pangan, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor,
22. Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan dan Nagari, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor,
23. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor,



24. Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor,
25. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor,
26. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal,
27. Satuan Polisi Pamong Praja, dipimpin oleh Seorang Kepala Kantor,
28. Kecamatan, dipimpin oleh seorang Camat, terdiri dari 3 Kecamatan:
 - (a) Kecamatan Guguk Panjang membawahi 7 kelurahan
 - (b) Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh, membawahi 8 Kelurahan
 - (c) Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, membawahi 9 Kelurahan

Struktur Organisasi Pemerintahan Kota Bukittinggi selanjutnya dapat dilihat pada Bagan Struktur sebagaimana tercantum pada bagan berikut ini :





1.3. SEJARAH SINGKAT KOTA BUKITTINGGI.

Kota Bukittinggi mulai berdiri seiring dengan kedatangan Belanda yang kemudian mendirikan kubu pertahanan pada tahun 1825 pada masa Perang Padri disalah satu bukit yang terdapat dalam kota ini, dikenal sebagai Benteng *Fort de Kock*, kemudian berkembang menjadi sebuah *Stadsgemeente* (kota), dan juga berfungsi sebagai ibukota *Afdeeling Padangsche Bovenlanden* dan *Onderafdeeling Oud Agam*.

Pada masa pendudukan Jepang, Kota Bukittinggi dijadikan sebagai pusat pengendalian pemerintahan militernya untuk kawasan Sumatera, kota ini menjadi tempat kedudukan komandan militer ke 25 Kenpeitai, dibawah pimpinan Mayor Jenderal Hirano Toyoji. Kemudian kota ini berganti nama dari *Stadsgemeente Fort de Kock* menjadi Bukittinggi. Setelah kemerdekaan Indonesia, Bukittinggi ditetapkan sebagai wilayah pemerintahan kota berdasarkan Ketetapan Gubernur Provinsi Sumatera Nomor 391 tanggal 9 Juni 1947, sekaligus menjadi ibukota Provinsi Sumatera, dengan gubernurnya Mr. Teuku Muhammad Hasan.

Kota Bukittinggi berperan sebagai kota perjuangan pada masa mempertahankan kemerdekaan Indonesia, dimana pada tanggal 19 Desember 1948, kota ini ditunjuk sebagai ibukota negara Indonesia setelah Yogyakarta jatuh ke tangan Belanda atau dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Dikemudian hari, peristiwa ini ditetapkan sebagai Hari Bela Negara, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 tanggal 18 Desember 2006.

1.3.1. DASAR HUKUM PEMBENTUKAN KOTA BUKITTINGGI

Dalam perkembangannya Kota Bukittinggi terbentuk atas Dasar Hukum sebagai berikut :

- 1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah jo Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok pokok Pemerintahan Dearah jo Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor



- 5 Tahun 1960 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong dan Sekretariat Daerah.
- 3) Undang-Undang nomor 61 Tahun 1958, Penetapan Undang-Undang Darurat No. 19 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat 1 Sumatera Barat, Jambi Dan Riau;
 - 4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
 - 5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1966 Tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6) Ketetapan Gubernur Propinsi Sumatera Nomor 391 Tanggal 9 Juni 1947 Tentang Pembentukan Kota Bukittinggi Sebagai Kota Yang Berhak Mengatur Dirinya Sendiri.

1.3.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

A. Geografi Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi terletak pada rangkaian Bukit Barisan yang membujur sepanjang pulau Sumatera, dikelilingi tiga gunung berapi yaitu Gunung Singgalang, Gunung Marapi dan Gunung Sago, serta berada pada ketinggian 909 – 941 meter di atas permukaan laut, jarak Kota Bukittinggi dengan Ibukota provinsi Sumatera Barat adalah sekitar 90 Km.

Wilayah Kota Bukittinggi terdiri atas 3 (tiga) kecamatan dan 24 (dua puluh empat) kelurahan dengan masing-masing luas wilayah sebagai berikut:

Kecamatan	Kelurahan	Luas Daerah (Km ²)	Prosentase Luas Kecamatan	Posisi Geografis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Guguk Panjang	7	6.831	27.07	100°, 22' 50" BT 0°, 18' 40" LS
Mandiingin Koto Selayan	9	12.156	48.16	100°, 22' 32" BT 0°, 17' 29" LS
Aur Birugo Tigo Baleh	8	6.252	24.77	100°, 23' 21" BT 0°, 19' 16" LS
Bukittinggi	24	25.239	100.00	100°, 22' 03" BT 0°, 17' 08" LS



1.4. ISU STRATEGIS PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

1.4.1. Penerapan ABS-SBK dan Pemberdayaan Masyarakat;

Isu ini menjadi penting meskipun selama ini kegiatan agama dan budaya tumbuh dan berkembang dengan baik, namun tantangan degradasi akhlak dan moral juga semakin besar. Aspek ini perlu diberikan penekanan dan perhatian utama dalam rangka mewujudkan Kota Bukittinggi sebagai kota terkemuka berbasis sumber daya manusia yang agamis.

Memberikan pemahaman yang seimbang dan sejalan dengan kultur budaya yang berkembang di masyarakat merupakan gerakan yang mesti dilakukan bersama dan terintegrasi. Bahwasanya segala sesuatu yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat sangat penting dari sisi agama dan pembangunan untuk memajukan daerahnya tanpa merusak tatanan budaya adat yang hidup di masyarakat. Kekuatan ini menjadi modal besar dan positif bagi kemajuan masyarakat dalam rangka mengimbangi berbagai dampak negative yang akan merusak karakter dan mental sebagai bangsa yang bermartabat.

Disamping itu pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi agar tercipta masyarakat yang berinisiatif untuk memulai proses kegiatan sosial agar mampu memperbaiki situasi dan kondisi diri sendiri. Berdasarkan pemahaman mengenai pengertian pemberdayaan masyarakat, upaya pemerintah untuk mengoptimalkan keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan di Kota Bukittinggi memerlukan penguatan agar potensi masyarakat yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan kota.

Modal besar yang perlu dibudayakan tersebut adalah falsafah *Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah, Syara' Mangato, AdaiK Mamakai*. Falsafah ini telah mampu mengangkat derajat dan martabat masyarakat Minangkabau termasuk Bukittinggi. Persoalannya untuk tatanan perkotaan, nilai-nilai tersebut rentan terdegradasi. Karena itu dibutuhkan upaya maksimal dan dilakukan melalui pemberdayaan seluruh elemen masyarakat.



1.4.2. Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

Reformasi Birokrasi pada dasarnya terdiri atas tiga elemen utama. *Pertama*, reformasi keuangan daerah yaitu sebuah mekanisme penganggaran yang tepat sasaran dan langsung menyentuh pada kepentingan masyarakat luas. Mekanisme ini tertuju pada proses kerja pemerintahan yang menentukan siapa berbuat apa, tenggat waktu serta target yang tepat. *Kedua*, reformasi sumber daya aparatur daerah yaitu sebuah kerangka kerja yang memastikan keberlangsungan sebuah program kerja dengan memusatkan perhatian kepada kesiapan sumber daya manusia. *Ketiga*, reformasi pelayanan publik; yaitu sebuah kondisi ideal pelayanan publik yang tersampaikan dari pemerintah kepada masyarakat sebagai hasil akhir dari reformasi keuangan daerah dan reformasi sumber daya aparatur. Dengan anggaran yang tepat dan profil aparat yang tepat, maka pelayanan publik ideal dapat diwujudkan dan selalu ditingkatkan dari waktu ke waktu sesuai dengan tuntutan dan standar layanan yang diinginkan masyarakat.

Tata pemerintahan yang baik merupakan isu yang paling mengemuka dalam teori dan praktek administrasi publik sesuai dengan perkembangan paradigma dari rule government menjadi good governance dan clean government. Membangun good governance bukan semata-mata masalah memperbaiki kondisi institusi pemerintah, akan tetapi yang lebih penting adalah membangun persoalan etika, sikap dan perilaku.

Perbaikan tata pemerintahan ini meliputi transparansi pemerintahan, profesionalisasi aparatur daerah, peningkatan pelayanan publik, ketaatan terhadap hukum dan lain-lainnya. Karena itu, reformasi birokrasi dalam hal ini merupakan upaya pokok yang perlu diperkuat dalam periode 5 tahun mendatang.

Pengelolaan tata pemerintahan yang baik, harus dimulai dari sumber daya manusianya. Sebagai apapun sistem yang di buat, kalau SDM tidak memadai tetap akan menjadi sebuah kendala besar. Input terhadap sebuah subjek, akan sangat menentukan kepada output dan outcomes. Pola tata kelola dan sarana prasarana akan mendukung semakin mantapnya jalan roda sebuah pemerintahan yang tentu saja akan sangat berdampak besar terhadap pembangunan. Ada beberapa isu yang berkaitan dengan pengelolaan tata pemerintahan yang baik dalam rangka membangun tata kelola pemerintahan yang baik, efektif, demokratis dan tepercaya, yaitu :



- a. Transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan
- b. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi
- c. Peningkatan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan publik
- d. Peningkatan semangat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (PPK)
- e. Perlunya semua stakeholder untuk dapat melakukan inovasi, yaitu semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inisiatif inovasi dapat berasal dari kepala daerah, anggota DPRD, aparatur sipil negara, Perangkat Daerah, dan anggota masyarakat.
- f. Penyediaan informasi Pemerintahan Daerah yang terdiri atas informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah. Informasi pembangunan daerah dan informasi keuangan daerah wajib diumumkan kepada masyarakat. Informasi Pemerintahan Daerah dikelola dalam suatu sistem informasi Pemerintahan Daerah.

Penggunaan teknologi informasi dan telekomunikasi untuk mendukung administrasi pemerintahan juga harus dilaksanakan untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien, efektif, transparan, dan memuaskan kepada masyarakat. Teknologi informasi dapat dipahami sebagai teknologi yang berhubungan dengan pengumpulan, penyimpanan, pengolahan dan penyebaran informasi. Teknologi informasi terdiri dari hardware dan software. Hardware berupa perangkat komputer dan jaringannya, sementara software adalah aplikasi-aplikasi dan sistem yang digunakan. Dan yang penting juga disiapkan dalam pengelolaannya adalah brainware berupa sumber daya manusia aparatur yang professional dan berintegrasi.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan juga dituntut transparansi dan akuntabel yang akan meningkatkan kepercayaan masyarakat, terutama dalam pengelolaan keuangan. Kemudian secara bersamaan pemerintah juga dituntut untuk mampu meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan public. Disinilah pentingnya reinventing government dimiliki oleh seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan.



Selanjutnya hubungan kerja dan koordinasi antar lembaga pemerintahan, termasuk antar pemerintah daerah juga menjadi focus untuk dioptimalkan.

1.4.3. Peningkatan Infrastruktur, Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi;

Infrastruktur fisik merupakan komponen dasar perekonomian dan aspek utama dalam pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur juga merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi sehingga penyediaan infrastruktur yang memadai menjadi kebutuhan yang harus disediakan oleh pemerintah. Termasuk dalam penyediaan infrastruktur adalah jalan, jembatan, drainase, penyediaan air bersih, pengelolaan limbah dan lain-lain. Pembangunan sarana dan prasarana daerah merupakan isu penting bagi peningkatan peranan Kota Bukittinggi sebagai Kota Pariwisata, perdagangan dan jasa, kota pendidikan dan Kota Kesehatan. Terbatasnya daya dukung kota membutuhkan perencanaan pembangunan infrastruktur yang matang dan sekaligus mampu menjawab berbagai persoalan kota.

Rencana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menghidupkan kembali jalur Kereta Api dari Padang ke Payakumbuh juga perlu didukung karena berdampak positif untuk meningkatkan kunjungan ke Bukittinggi dan pemenuhan kebutuhan transportasi masal yang murah dan representative. Menyambut kebijakan tersebut, Bukittinggi juga perlu meningkatkan infrastruktur kota menjadi kota yang indah, bersih, rapi dan menyenangkan. Di samping itu, juga dibutuhkan sarana prasarana berupa pusat perbelanjaan, perhotelan, gedung konvensi dan peningkatan daya tarik wisata.

Sebagai kota jasa, dukungan teknologi informasi menjadi amat penting dalam konsep *smart city*. Sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *e-Government*, pemerintah perlu mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar dapat mengeliminasi sekat-sekat birokrasi organisasi, serta membentuk jaringan sistem manajemen dan proses kerja yang memungkinkan instansi pemerintah bekerja secara terpadu untuk menyederhanakan akses dan transparansi ke semua informasi dan layanan publik. Karena itu, gubernur dan bupati/walikota diharuskan untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi dan



kewenangannya masing-masing guna terlaksananya pengembangan e-government secara nasional.

1.4.4. Lingkungan Hidup

Peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya meliputi aspek pendapatan, pendidikan dan kesehatan saja, tetapi juga termasuk mempertahankan kualitas dan daya dukung lingkungan. Tanpa penjagaan kualitas lingkungan hidup yang baik, kemajuan ekonomi dan sosial menjadi kurang berarti dan malah akan menjadi persoalan baru karena berkurangnya daya dukung lingkungan.

Isu lingkungan menempati posisi strategis dalam konteks Pembangunan berkelanjutan yang berprinsip untuk memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi masa depan (Brundtland Report dari PBB, 1987). Faktor penting untuk mencapai berkelanjutan adalah pembangunan dengan tetap memperhitungkan faktor lingkungan. Penanganan yang tepat terhadap permasalahan lingkungan yang muncul sebagai dampak dari pembangunan menjadi tugas pemerintah.

Dinamika kota yang sangat tinggi akan semakin menguras daya dukung lingkungan berupa bertambahnya luas lahan terbangun dan terjadinya polusi. Kondisi saat ini menunjukkan kemampuan daya tampung kota semakin menurun sebagai dampak dari kegiatan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan pembenahan dan penambahan daya dukung kota pada lokasi-lokasi yang masih memungkinkan.

Pengendalian dan pemeliharaan kualitas lingkungan kota tidak terlepas dari penyediaan ruang terbuka hijau kota. Upaya pemenuhan kebutuhan RTH sampai saat ini dilakukan dengan membangun dan meningkatkan taman kota, pelestarian dan peningkatan terhadap hutan kota, jalur hijau, sempadan sungai, dan mendorong peningkatan RTH privat. Konsep green city juga menjadi bagian penting untuk terus dikembangkan, dengan dukungan pemerintah melalui lembaga dan kementerian terkait.

1.4.5. Pelaksanaan MEA

Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) mulai diberlakukan pada akhir Desember 2015, dimana ASEAN akan menjadi pasar tunggal dan satu kesatuan basis produksi, sehingga akan terjadi aliran bebas barang, jasa, investasi, modal, dan tenaga kerja terampil antar negara ASEAN. Hal ini merupakan peluang



sekaligus tantangan yang perlu disikapi oleh Kota Bukittinggi secara cermat dan terintegrasi. Edukasi masyarakat tentang peluang MEA 2015, peningkatan daya saing perekonomian daerah, serta peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kerja di daerah akan menjadi aset berharga bagi Daerah untuk meraih keberhasilan dalam memperoleh manfaat dari MEA bagi kepentingan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA 2015 dan meningkatkan peran aktif kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi MEA. Terkait dengan pelaksanaan MEA tersebut, perlu adanya peningkatan efektivitas sosialisasi, komunikasi, serta layanan edukasi terhadap masyarakat dan para pelaku bisnis mengenai pemahaman dan pemanfaatan Masyarakat Ekonomi ASEAN bagi kepentingan pembangunan di daerah.

Beberapa upaya yang mesti dilakukan daerah untuk mengambil manfaat dalam pelaksanaan MEA tersebut adalah: peningkatan iklim usaha dan investasi yang kondusif, peningkatan daya saing produk unggulan daerah, peningkatan infrastruktur, peningkatan daya saing sumber daya manusia, serta peningkatan kapasitas UMKM di daerah. Peningkatan daya saing perekonomian daerah untuk menghadapi implementasi MEA melalui: peningkatan peran aktif berbagai pemangku kepentingan di daerah, maupun kalangan dunia usaha dalam mengoptimalkan manfaat dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN. Peningkatan daya saing perekonomian daerah perlu didukung oleh kebijakan pemerintah daerah yang kondusif, yang tidak menciptakan ekonomi biaya tinggi. Peningkatan infrastruktur akan dititikberatkan pada upaya untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang akan meningkatkan efisiensi ekonomi dan kelancaran arus barang dan jasa keluar masuk Kota Bukittinggi.

Peningkatan kualitas sumber daya manusia perlu diarahkan untuk menciptakan lulusan pendidikan yang lebih berkualitas, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, serta mendorong sertifikasi kompetensi pekerja di daerah agar dapat berdaya saing di pasar ASEAN. Selain itu Pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong penciptaan nilai tambah ekonomi yang lebih tinggi, mengurangi perizinan yang menghambat investasi sehingga



terjadi peningkatan investasi masuk ke Daeraantara lain dengan pengembangan sistem inovasi daerah dan penerapan inovasi pelayanan publik.

1.4.6. Peningkatan Mutu Pelayanan Pendidikan Dan Kesehatan

Pendidikan merupakan sarana untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang menjadi objek dan subjek pembangunan. Dari hasil penelitian terungkap bahwa pembangunan sektor pendidikan dengan manusia sebagai fokusnya telah memberikan kontribusi langsung terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, melalui peningkatan keterampilan dan kemampuan produksi tenaga kerja. Untuk itu, Pemerintah perlu memberikan perhatian khusus di bidang pendidikan agar setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam mendapatkan akses pendidikan. Secara umum, indikator kinerja standar pelayanan bidang pendidikan Kota Bukittinggi telah memenuhi target pencapaian. Akses layanan pendidikan yang merata dan berkeadilan bagi semua lapisan masyarakat harus lebih ditingkatkan lagi dalam rangka meningkatkan capaian target indeks pendidikan. Untuk itu diperlukan upaya dalam mengurangi ketimpangan kualitas sekolah dengan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan, peningkatan infrastruktur sekolah, meningkatkan kapasitas tenaga pendidik, memberlakukan standar manajemen yang sama, serta menjalankan rotasi dan mutasi guru/kepala sekolah secara berkala sehingga setiap sekolah dapat memberikan kualitas pelayanan secara merata bagi setiap lapisan masyarakat. Di samping itu, dengan adanya rotasi dan mutasi secara berkala diharapkan akan terjadi transfer informasi manajemen sekolah yang dibutuhkan dalam rangka mengurangi disparitas kualitas pendidikan sekolah .

Disamping pendidikan, faktor kesehatan masyarakat juga sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan. Kualitas kesehatan yang baik akan memberikan sumber daya manusia yang siap untuk melaksanakan pembangunan suatu negara. Penanganan kesehatan yang sinergis dengan faktor lingkungan menjadi penting, karena tindakan preventif dalam bidang kesehatan perlu dikembangkan disamping upaya kuratif berupa pengobatan. ada pula upaya promotif dan preventif sebagai upaya peningkatan kualitas dan menjaga kesehatan masyarakat agar tidak mudah terjangkiti penyakit. Konsep penanganan kesehatan secara promotif dan preventif mendorong



adanya pemahaman bahwa faktor kesehatan lingkungan merupakan aspek penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Diperlukan peningkatan layanan kesehatan promotif dalam bentuk peningkatan higienitas dan sanitasi lingkungan yang ruang lingkupnya meliputi penyediaan air bersih rumah tangga, metode pengelolaan dan pembuangan sampah, penanganan kotoran dan air limbah rumah tangga sehingga dapat dipahami bahwa kesehatan lingkungan adalah upaya promotif yang harus dijalankan lintas sektoral. Upaya preventif juga promotif dalam konsep penanganan kesehatan adalah melalui kegiatan Posyandu yang menitikberatkan kepada penanganan kesehatan balita.

1.4.7. Pembangunan Kependudukan

Masalah Kependudukan dan Keluarga Berencana merupakan tantangan bagi pembangunan kesejahteraan di Kota Bukittinggi. Berdasarkan pendataan keluarga tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bukittinggi sebesar 101.024 Jiwa, terdiri dari 50.630 jiwa laki laki atau 50,12% dan 50.394 jiwa perempuan atau setara dengan 49,88%. Sedangkan jumlah anak sebesar 18.168 jiwa terdiri dari 9.311 anak laki – laki atau 5,25% dan 8.857 anak perempuan atau 48,75%. Apabila kita tambahkan jumlah penduduk perempuan dan jumlah anak di Kota Bukittinggi mencapai 68.562 jiwa atau 67,88%. Artinya struktur penduduk Bukittinggi telah dengan jelas mereferensi Pemerintah Kota Bukittinggi untuk memfokuskan manfaat pembangunan kesemua penduduk terutama perempuan dan anak, Karena baiknya sebuah Kota bahkan Negara memang lebih banyak ditentukan oleh kualitas perempuannya dan pola asuh keluarga terhadap anak sebagai generasi penerus bangsa.

Apalagi dikaitkan dengan puncak bonus demografi tahun 2028, dimana struktur penduduk Kota Bukittinggi jumlah penduduk produktif (18 - 65 tahun) lebih besar dibandingkan dengan penduduk non produktif (≤ 17 sampai ≥ 66 tahun). Artinya kebijakan pembangunan yang tidak memastikan penduduk produktif memiliki kompetensi dan berkualitas, justru akan mendatangkan permasalahan yang sangat kompleks. Pemerintah harus memastikan, penduduk produktif harus memiliki pekerjaan dan tabungan, harus berpendidikan, harus sehat, harus memiliki fondasi agama dan budaya yang kuat. Sehingga dengan kondisi tersebut, struktur penduduk tahun 2028



tersebut dipastikan memberikan bonus. Apabila kondisi tersebut tidak terjadi maka yang di tahun 2028 kondisi yang ada justru bencana demografi, karena jumlah penduduk yang besar tersebut tidak berkualitas. Apabila ditarik ketahun 2017, maka penduduk yang berumur mulai 7 tahun sampai dengan penduduk berumur 54 tahun harus dipastikan mendapat porsi pembinaan dan pembangunan yang terintegrasi dan memastikan mereka memiliki kualitas dan kompetensi yang baik.

Grand Desain Kependudukan yang telah dilegalisasi dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 tentang Grand Desain Kependudukan tahun 2010 s/d 2035 menjadi pedoman dalam menyusun Rencana Pembangunan di Kota Bukittinggi, sehingga pembangunan Kota Bukittinggi belum kuat berwawasan kependudukan. Grand Design kependudukan telah merinci 5 (lima) aspek pembangunan kependudukan yaitu Pengendalian kuantitas penduduk, Peningkatan Kuantitas penduduk, Pengarahan mobilitas penduduk, Pembangunan Keluarga dan Pembangunan data Base Kependudukan. Laju Pertumbuhan Penduduk masih di strata 1,77, yang disebabkan faktor urbanisasi sebagai akibat atau eksek dari Bukittinggi sebagai kota wisata, Kota Perdagangan, Kota Pendidikan dan Kota Kesehatan. Urbanisasi berasal dari masyarakat *hinterland* atau masyarakat di sekitar kota Bukittinggi seperti Agam, Lima Puluh Kota, Padang Pariaman bahkan dari Sumatera Utara dan Riau semakin hari semakin besar, dan nyaris tidak terkendali. Akibat tidak adanya strategi pengembangan ekonomi yang mampu memproteksi atau mengurangi pendatang. Rata-rata Kepadatan penduduk Kota Bukittinggi telah mencapai 4.774 jiwa/km², dan untuk Kecamatan Guguk panjang kepadatan penduduk telah mencapai 6.601 Jiwa / Km². Meningkatnya indeks harapan hidup tidak dibarengi dengan program dan kegiatan yang membuat seorang lansia tangguh dan memiliki nilai manfaat. Apabila ini tidak menjadi konsentrasi Pemko Bukittinggi, ini justru akan menjadi beban baru. Bonus Demografi tahun 2028, mengharuskan ketepatan kebijakan dan program, agar bonus demografi benar – benar dapat dicapai. Tinggi pertumbuhan ekonomi tidak berdampak signifikan kepada penanggulangan kemiskinan karena pertumbuhan penduduk tidak menjadi prioritas program. Garapan program KB terhadap Pasangan Usia Subur sebenarnya sudah baik yaitu 69,16%, namun karena laju pertumbuhan penduduk dari faktor urbanisasi strata PUS sangat tinggi ke Bukittinggi,



membuat kinerja garapan program KB ke PUS terkesan stagnasi, sehingga benar benar diperlukan strategi arus masuk penduduk ke Kota Bukittinggi yang lebih berpihak kepada program kependudukan, Karena tanpa adanya regulasi yang jelas, maka LPP Kota Bukittinggi sulit diturunkan. Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang istrinya berumur 15-49 tahun, atau pasangan suami istri yang istrinya berumur kurang dari 15 tahun dan sudah haid (datang bulan), juga termasuk istri berumur lebih dari 50 tahun tetapi masih haid.

1.4.8. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak

Fungsi kodrati hak perempuan dan anak melalui program pengarusutamaan Gender, perlindungan hak-hak perempuan, serta menjamin hak dasar anak dalam rangka menjamin kesetaraan hak laki-laki dan perempuan dalam hidup sebagai anugerah Tuhan yang maha kuasa, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan terhadap anak dan kepada perempuan, telah ditegaskan dalam UUD 1945. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan jaminan setiap warga Negara Indonesia dan berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan penindasan sesuai falsafah Pancasila.

Untuk meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara , wajib melaksanakan PUG kedalam seluruh proses pembangunan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan fungsional semua instansi dan lembaga pemerintah di tingkat pusat dan daerah dengan cara mengintegrasikan dimensi kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan , pelaksanaan , monitoring dan evaluasi serta pelaporan pembangunan. Isu-isu yang terkait dengan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, adalah urusan wajib yang dilaksanakan oleh Pemerintah mulai dari Pusat sampai ke daerah yang meliputi Pengarusutamaan gender, Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Untuk urusan pemberdayaan perempuan dan anak, Kota Bukittinggi telah melakukan kegiatan yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak baik berupa pelatihan, sosialisasi, pembinaan yang ditujukan bagi kaum perempuan dan anak, serta melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan dan penanggulangan masalah



KDRT. Walaupun semua pengaduan dapat ditanggulangi dengan baik namun tidak semua kasus yang ada di masyarakat terpantau dengan baik, karena tidak dilaporkan ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Hal ini menunjukkan pengetahuan dan wawasan masyarakat terhadap penanganan kasus KDRT dan perlindungan anak, masih perlu ditingkatkan. Masih tingginya tindakan KDRT, menunjukkan peran masyarakat dan lembaga kemasyarakatan belum kuat.

Partisipasi perempuan di Kota Bukittinggi dapat dilihat di segala bidang kehidupan, baik politik dan lembaga legislatif, pemerintah dan lembaga eksekutif, yudikatif maupun organisasi kemasyarakatan lainnya bahkan menjadi pelaku ekonomi. Namun demikian, partisipasi perempuan dalam kehidupan publik tidak cukup diimbangi dengan meningkatnya jumlah perempuan sebagai pengambil keputusan. Keterlibatan perempuan pada sektor publik di Kota Bukittinggi, khususnya Pegawai Negeri Sipil perempuan yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi berjumlah 2.227 orang atau 60,40% dari jumlah seluruh ASN yang ada, yaitu sebesar 3.683 orang pegawai. Dilihat dari perbandingan perempuan bekerja di lembaga pemerintah dengan pegawai yang ada, sudah memperlihatkan angka yang sangat baik, bahkan melampaui batas amanah UU yaitu 30%. Namun apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (umur 20 sampai 60 tahun) yang berjumlah sebesar 29.341 jiwa, persentase perempuan yang bekerja pada pemerintah hanya mencapai 7,6%, disatu pihak amanat Undang – Undang , mengamanatkan kuota perempuan sebesar 30 %, kondisi ini harus di akui sebagai belum tuntasnya program pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi, tentu hal ini perlu mendapat perhatian khusus dari Pemerintah, bahwa pada kenyataannya, kesetaraan dan keadilan gender masih perlu ditingkatkan.

Secara keseluruhan, artinya program pengarusutamaan gender, Pemberdayaan Perempuan masih perlu menjadi konsentrasi Pemerintah Kota Bukittinggi dan bersifat terintegrasi dan melibatkan semua pihak.

Selanjutnya dalam pemenuhan hak anak yakni 5 klaster hak anak (KHA) dengan 31 indikator telah dibuat gugus tugas Kota Layak anak (KLA). Untuk perlindungan dari kekerasan juga telah dibuat gugus tugas GN-AKSA dan P2TP2A. Bahkan saat ini Bukittinggi telah memiliki Peraturan Daerah Nomor



04 tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan anak. Hal ini tentu sebagai komitmen nyata Pemerintah Kota Bukittinggi, untuk urusan Perempuan dan Anak.

1.4.9. Penanggulangan Kemiskinan.

Kemiskinan dan pengangguran merupakan persoalan ekonomi makro yang berpengaruh terhadap mutu hidup manusia baik dari sisi kesehatan maupun pendidikan. Persoalan ini mempengaruhi kehidupan ekonomi berupa menurunnya daya beli masyarakat dan semakin sulitnya alokasi rumah tangga. Kondisi ini telah berakibat terhadap anggaran pembangunan yang tersedia agar mengarah kepada pembenahan persoalan kemiskinan dan pengangguran. Percepatan pencapaian tujuan *Millenium Development Goals* (MDGs) merupakan amanah dari Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Nasional dan Inpres Nomor 3 tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Pencapaian target *Millenium Development Goals* (MDGs) akan berakhir pada tahun 2015, terdapat fenomena pada beberapa negara yang targetnya dikhawatirkan tidak tercapai. Namun dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) sebagai kelanjutan agenda global pasca MDGs, kekhawatiran ini tidak terjadi. Agenda SDGs ini relevan dengan garis kebijakan empat pilar pemerintah yang telah mencanangkan tercapainya pertumbuhan ekonomi, penurunan tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan perbaikan lingkungan hidup. Berkaitan dengan hal tersebut, kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Bukittinggi setelah tahun 2015, sudah barang tentu akan menindaklanjuti agenda SDGs ini. Prioritas penurunan tingkat kemiskinan dan pengangguran diarahkan untuk membuka seluas-luasnya lapangan kerja melalui pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dan kemudahan permodalan, yang pada gilirannya nanti akan dapat mewujudkan 1) penurunan tingkat pengangguran; 2) ketersediaan tenaga kerja terampil; 3) peningkatan pendapatan masyarakat, 4) meningkatnya produktivitas usaha; 5) pemberdayaan perempuan warga lansia untuk usaha-usaha produktif.

Disamping isu strategis diatas, maka tak kalah pentingnya yang harus menjadi pekerjaan yang berat adalah Pengalihan Kewenangan Urusan Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah, terdapat beberapa urusan yang dialihkan



kewenangannya dari kewenangan daerah menjadi kewenangan Provinsi/Pusat (urusan konkuren). Adapun urusan pemerintah konkuren tersebut meliputi penyelenggaraan sub urusan:

- a. Pengelolaan pendidikan menengah;
- b. Pengelolaan terminal penumpang tipe A dan tipe B;
- c. Pelaksanaan rehabilitasi di luar kawasan hutan negara;
- d. Pelaksanaan perlindungan hutan di hutan lindung dan hutan produksi;
- e. Pemberdayaan masyarakat di bidang kehutanan;
- f. Pelaksanaan penyuluhan kehutanan Provinsi;
- g. Pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang dan pengawasan;
- h. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
- i. Pengelolaan tenaga pengawas ketenagakerjaan;
- j. Penyelenggaraan penyuluhan perikanan nasional; dan
- k. Penyediaan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan.

1.5. DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2015 ini didasarkan kepada :

- 1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005



- Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 6) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 - 8) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 9) Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
 - 10) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 - 11) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bukittinggi;
 - 12) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 9 Tahun 2013;
 - 13) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2013;
 - 14) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bukittinggi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2013;
 - 15) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Bukittinggi;



- 16) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2006 – 2025;
- 18) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2015;
- 19) Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 18 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2015;
- 20) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 20 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2015;
- 21) Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 64 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 64 Tahun 2014 tentang penjabaran.

1.6. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 ini dimaksudkan untuk mengungkap pertanggungjawaban tingkat pencapaian pengukuran kinerja dan Evaluasi Pemerintah Kota Bukittinggi dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan pencapaian tujuan dan sasaran serta strategi berupa kebijakan dan program yang terdiri atas kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Bukittinggi tahun 2016.

Adapun tujuan penyusunan LKIP ini secara umum adalah sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak terkait, meningkatkan kepercayaan publik kepada pemerintah, serta meningkatkan kinerja instansi pemerintah dalam mewujudkan visi dan misi pemerintah kota. Akhirnya penyusunan LKIP ini diharapkan dapat membantu upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).



1.7. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 ini menjelaskan pencapaian kinerja yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016. Capaian kinerja tersebut merupakan perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dengan realisasi kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kota Bukittinggi. Analisis atas capaian kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja memungkinkan diidentifikasi dari sejumlah celah kinerja guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. Berdasarkan kerangka pikir tersebut, sistematika penyajian Laporan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

Bab I *Pendahuluan*

Pada bab ini memuat penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi

Bab II *Perencanaan Kinerja*

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III *Akuntabilitas Kinerja*

Dalam bab ini diuraikan pencapaian sasaran-sasaran strategis, Indikator Kinerja, Metodologi Pengukuran Kinerja, Analisis Pencapaian Kinerja, Capaian Kinerja, Kendala yang dihadapi dan Aspek Keuangan.

Bab IV *Penutup.*

Mengemukakan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan untuk meningkatkan kinerja.

BAB 2

PERENCANAAN

KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

2. 1. VISI DAN MISI

2.1.1 VISI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021, dinyatakan bahwa visi daerah adalah:

VISI

“Terwujudnya Bukittinggi Kota Tujuan Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, Perdagangan dan Jasa, Berlandaskan Nilai Agama dan Budaya”

Makna yang terkandung dari visi di atas, adalah sebagai berikut:

1. Bukittinggi kota tujuan pariwisata mempunyai makna bahwa Bukittinggi merupakan salah satu sentral wisata di wilayah Indonesia bagian barat yang disemangati dengan budaya yang bermartabat, masyarakat yang religius, kegiatan perdagangan yang maju, alam yang indah, kuliner yang berkelas, tertata, bersih dan sehat.
2. Bukittinggi kota pendidikan mengandung makna bahwa Bukittinggi mempunyai sumber daya manusia yang berkualitas dan mempunyai daya saing yang tinggi.
3. Bukittinggi kota kesehatan mengandung makna bahwa masyarakat kota Bukittinggi mempunyai lingkungan yang sehat dengan derajat kesehatan yang tinggi dan sentra pelayanan kesehatan daerah sekitarnya
4. Bukittinggi kota perdagangan dan jasa mengandung makna bahwa semua pelaku ekonomi mempunyai jiwa kewirausahaan yang berdaya saing tinggi
5. Bukittinggi sebagai kota yang berlandaskan nilai-nilai agama mengandung makna bahwa masyarakat Bukittinggi menjadikan agama sebagai landasan dalam tata-tatanan kehidupan bermasyarakat dan berusaha.
6. Bukittinggi sebagai kota yang beradat dan berbudaya mengandung makna dalam menjalankan kehidupan sehari-hari berdasarkan filosofi Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah



2.1.2. MISI

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Kota Bukittinggi tersebut, ditetapkan lima Misi Pembangunan Jangka Menengah Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 sebagai berikut:

MISI

- 1. Mengembangkan dan Memberdayakan partisipasi berbagai potensi pemangku kepentingan (Pemerintah, Dunia usaha dan Masyarakat).**
- 2. Meningkatkan kinerja Pemerintahan secara professional, transparan, akuntabel dan mempunyai jiwa kewirausahaan.**
- 3. Meningkatkan pembangunan, penataan dan pengelolaan Sarana dan Prasarana secara terpadu dan berwawasan lingkungan.**
- 4. Mengembangkan system ekonomi perkotaan secara lebih berdaya guna.**
- 5. Meningkatkan kualitas pelayanan pariwisata, pendidikan, kesehatan, perdagangan dan jasa serta kesejahteraan sosial masyarakat**

2.1.3. PERENCANAAN KINERJA

Tahun 2016 merupakan tahun pertama implementasi RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, yang penyusunannya dilakukan melalui penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016, dimana pada waktu penyusunan awalnya masih memperhatikan RKPD yang lama. Dengan ditetapkannya RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, dilakukan penyempurnaan perencanaan tahunan dimaksud, berikut Perjanjian Kinerja Tahun 2016.

Prioritas Pembangunan Kota Bukittinggi tahun 2016 berdasarkan RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016 – 2021 adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mental, Penerapan ajaran agama, adat dan budaya;
2. Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Lebih Baik;



3. Peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
4. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat
5. Pengembangan Pariwisata
6. Pengembangan ekonomi kerakyatan (Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah)
7. Penanggulangan Kemiskinan
8. Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur
9. Pelestarian lingkungan hidup

2.2. PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI TAHUN 2016

Dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 yang telah ditetapkan berpedoman pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bukittinggi.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016 PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	
1	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1.1	Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong .	jml	72
		1.2	Perusahaan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	%	70
2	Meningkatnya event generasi muda dalam	2.1	Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda/kepemudaan	jml	52



	pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	2.2	Sanggar seni yang aktif	jml	7
3	Meningkatnya event olahraga generasi muda	3.1	Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda / Kepemudaan	Jenis	6
4	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	4.1	Kelompok/organisasi Remaja Masjid yang aktif dalam bidang keagamaan	jml	5
		4.2	Jumlah Event keagamaan	Jenis	3
5	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	5.1	% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	%	50
		5.2	Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)		LPPD Rangking 65, LKIP C
		5.3	Jumlah inovasi pelayanan publik	Jml	1
		5.4	% capaian program pembentukan peraturan daerah	%	19
6	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	6.1	Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP
7	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	7.1	indeks kepuasan layanan publik	%	30
8	Terpenuhinya RTH Kota	8.1	% RTH Publik	%	8
9	Fasilitas publik yang memenuhi standar lingkungan	9.1	% fasilitas sosial yang representativ dan memenuhi standar lingkungan	%	75
		9.2	% Fasum yang representativ dan memenuhi standar lingkungan	%	55
10	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman kumuh)	10.1	% air minum layak	%	93
		10.2	Kawasan Kumuh	%	-
		10.3	% sanitasi layak	%	95



11	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	11.1	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	55
		11.2	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	50
12	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	12.1	Benda cagar budaya yang lestari	%	5
13	Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	13.1	jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	Unit	1
14	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	14.1	Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	%	81
		14.2	Fasilitas Keselamatan Jalan	%	71
		14.3	Jalan berkondisi baik	%	86
15	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat dan terhadap bencana	15.1	Fasilitas kebencanaan	%	60
16	Berkembangnya koperasi	16.1	Jumlah Koperasi sehat	Jml	12
17	Berkembangnya usaha mikro	17.1	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	Jml	5
18	Berkembangnya investasi	18.1	Jumlah Investasi	Rp Triliun)	1.884
19	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	19.1	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)	Unit	5
20	Meningkatnya lapangan kerja	20.1	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.84
21	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	21.1	Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp	34.758.804.463
22	Meningkatnya kunjungan wisatawan	22.1	jumlah kunjungan wisatawan	Jml	483.950



23	Meningkatkan mutu pendidikan	23.1	Harapan lama sekolah	Tahun	14,7
		23.2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	10,85
		23.3	APK PAUD (3 - 6 TH)	%	86,00
		23.4	Angka Putus sekolah Jenjang SD, SMP	%	0,22
		23.5	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	72,88
		23.6	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	54,50
		23.7	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	%	63,60
		23.8	% Kompetensi keahlian yang berakreditasi A tingkat SMK	%	37,20
24	Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan	24.1	Jumlah Mata Pelajaran Muatan Lokal pendidikan karakter berbasis adat dan budaya minangkabau	Jml	100%
25	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	25.1	Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36
		25.2	Puskesmas yang terakreditasi	Jml	2
		25.3	Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	81
26	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarsutamaan gender dan perlindungan anak	26.1	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,71
		26.2	Tingkat Kemiskinan	%	4,23
		26.3	Indek Pemberdayaan gender	%	70,84
		26.4	Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	%	80
27	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	24.3	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Rp Triliun	2.338
28	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragama, seimbang dan	24.4	Skor pola pangan harapan (PPH)	%	84,1



	aman berbasis sumberdaya lokal				
29	Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	24.5	Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	Kasus	650

BAB 3

AKUNTABILITAS

KINERJA



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 merupakan Perwujudan kewajiban Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber dana lainya, dalam rangka mencapai misi pemerintah daerah secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 27 sasaran strategis dengan 49 indikator kinerja.

3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Target Kinerja

Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan capaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut ini.



**Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan/Kegagalan
 Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2016**

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85% - 100%	Sangat Baik
2	69% - 84%	Baik
3	53% - 68%	Cukup
4	<53%	Gagal

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Hasil pengukuran capaian target indikator, dari 26 sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Hasil Pengukuran Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1.1 Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong .	jml	72	70	97
		1.2 Perusahanan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	%	70	60	85
2	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	2.1 Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda/kepemud aan	jml	52	52	100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
		2.2 Sanggar seni yang aktif	jml	7	8	114
3	Meningkatnya event olahraga generasi muda	3.1 Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda / Kepemudaan	jml	6	7	116
4	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	4.1 Kelompok/orga nisasi Remaja Mesjid yang aktif dalam bidang keagamaan	jml	3	4	133
		4.2 Jumlah Event keagamaan	jml	3	3	100
5	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	5.1 % pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	%	50	63,65	127
		5.2 Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	Nilai	LPPD Rangking 65, LKIP C	63 CC	96 150
		5.4 % capaian program pembentukan peraturan daerah	%	19	13	68
6	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	6.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	100
7	Terpenuhinya RTH Kota	7.1 % RTH Publik	%	8	8	100
8	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman)	8.1 % air minum layak	%	93	78	83
		8.2 % sanitasi layak	%	95	72,72	76
9	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	9.1 Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	55	85	154
		9.2 Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	50	59	118



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
10	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	10.1 Benda cagar budaya yang lestari	%	5	6	120
11	Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	11.1 Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	jml	1	1	100
12	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	12.1 Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	%	81	100	123
		12.2 Fasilitas Keselamatan Jalan	%	71	70	98
		12.3 Jalan berkondisi baik	%	86	85,67	99,6
13	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat dan terhadap bencana	13.1 Fasilitas kebencanaan	%	60	71	118
14	Berkembangnya koperasi	14.1 Jumlah Koperasi sehat	Jml	12	13	108
15	Berkembangnya usaha mikro	15.1 Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	Jml	5	5	100
16	Berkembangnya investasi	16.1 Jumlah Investasi	Rp Triliun	1.884	1.771	93
17	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	17.1 Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)	jml	5	5	100
18	Meningkatnya lapangan kerja	18.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5.84	6,04	96,5
19	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli	19.1 Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp	34.758.804.463	30.709.690.231	88



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	Daerah (PAD)					
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	20.1 jumlah kunjungan wisatawan	Jml	483.950	499.806	103
21	Meningkatkan mutu pendidikan	21.1 Harapan lama sekolah	Tahun	14,7	14,92	79
		21.2 Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	10,85	10,79	99
		21.3 APK PAUD (3 - 6 TH)	%	86,00	79	91
		21.4 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	72,88	79	108
		21.5 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	54,50	73	135
		21.6 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	%	63,60	82	130
		21.7 % Kompetensi keahian yang berakreditasi A tingkat SMK	%	37,20	42	113
22	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	22.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,13	101
		22.2 Puskesmas yang terakreditasi	Jml	2	2	100
		22.3 Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	81	85	104
23	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarusutamaan gender dan perlindungan anak	23.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,71	1,71	100
		23.2 Tingkat Kemiskinan	%	4,23	5,46	71
		23.3 Indek Pemberdayaan gender	%	70,84	91	129
		23.4 Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	%	80	112	140
24	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	24.1 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Rp Triliun	2.338	1.844	78
25	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan	25.1 Skor pola pangan harapan (PPH)	%	84,1	83,9	99,7



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
	aman berbasis sumberdaya local					
26	Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	26.1 Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	Kasus	650	657	101
Rata-rata						105%

Dari tabel diatas dapat dilihat, capain rata-rata dari 46 indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pencapaian 26 sasaran strategis yang ditetapkan tahun 2016 sebesar 105%. Sesuai dengan Klasifikasi Penilaian dan Kategori Penilaian Keberhasilan **Sangat baik**.

3.3. Analisis Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil capaian terhadap pengukuran indikator kinerja Kota Bukittinggi Tahun 2016 yang telah dicantumkan pada tabel pengukuran kinerja, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian kinerja per sasaran strategis untuk mewujudkan masing-masing misi yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

MISI I : MENGEMBANGKAN DAN MEMBERDAYAKAN PARTISIPASI BERBAGAI POTENSI PEMANGKU KEPENTINGAN (PEMERINTAH, DUNIA USAHA, DAN MASYARAKAT)

Sesuai Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, misi ini dicapai melalui 3 tujuan dan 4 sasaran strategis yang akan dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pada seluruh SKPD terkait. Adapun tujuan dan sasaran tersebut adalah sebagai berikut:



No	Tujuan	No	Sasaran Strategis
1.1	Meningkatnya sinergitas pemerintah dengan pemangku kepentingan dalam pelaksanaan pembangunan	1.1.1	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat
1.2	Meningkatnya aktifitas generasi muda dalam penggalan potensi diri (seni, budaya, dan olah raga)	1.2.1	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya
		1.2.2	Meningkatnya event olahraga generasi muda
1.3	Meningkanya fungsi Rumah Ibadah untuk Penguatan Iman dan Taqwa dan Generasi Muda	1.3.1	Meningkatnya fungsi rumah ibadah

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 1 akan dianalisis berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 1.1 : MENINGKATNYA SINERGITAS PEMERINTAH DENGAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

Tujuan pertama pada misi 1 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut :

	<p>SASARAN STRATEGIS 1.1.1</p> <p>Meningkatnya Pembangunan Fisik Yang Merupakan Hasil Keterpaduan Antar Pemerintah, Dunia Usaha Dan Masyarakat</p>
---	--

Capaian sasaran strategis 1.1.1 ini diukur berdasarkan capaian terhadap dua Indikator Kinerja utama seperti pada tabel dibawah ini :



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong .	72 bh	70 bh	97%
2.	Perusahaan / dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	70%	60%	85%
Rata-rata Capaian				91%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 91%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong dengan kondisi awal berjumlah 38 bangunan fisik, pada tahun 2016 ditargetkan 72 bangunan fisik dengan realisasi 70 bangunan fisik, meskipun persentase capaian belum 100% namun dari kondisi awal sampai kondisi tahun 2016 telah banyak terjadi penambahan jumlah bangunan fisik.

Perusahaan / dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan dengan kondisi awal 40%, pada tahun 2016 ditargetkan dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan ditargetkan 70%, dengan realisasi mencapai 60%, meskipun persentase capaian belum 100% namun dari kondisi awal sampai kondisi tahun 2016 telah banyak terjadi peningkatan.

1. Jumlah Pembangunan Fisik Yang Dilaksanakan Dengan Melibatkan Swadaya Masyarakat Dengan Semangat Gotong Royong



Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan masyarakat dengan semangat gotong royong = **Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong 70 bh**

Salah satu wujud partisipasi masyarakat yang diharapkan untuk Meningkatkan pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada tahun 2016 ditargetkan berupa Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong sebanyak 70 bangunan. Target ini terealisasi sebanyak 72 bangunan fisik, dengan tingkat capaian 97%.

Pencapaian program ini oleh Pemerintah Kota Bukittinggi diwujudkan melalui Program Manunggal Sakato, yang merupakan kegiatan tahunan pada seluruh kecamatan dengan dana stimulan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada masing-masing kelurahan. Melalui dana stimulan ini, masyarakat kelurahan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat menyusun perencanaan kegiatan, baik fisik maupun non fisik. Kegiatan fisik yang dilakukan berskala lingkungan kelurahan, dimana perencanaan teknis dilakukan oleh masarakat secara mandiri dengan memberdayakan potensi yang ada di kelurahan dibawah pengawasan dinas teknis.

Pelaksanaan fisik berupa pembebasan lahan langsung dimusyawarahkan oleh LPM dengan melakukan pendekatan pada pemilik lahan untuk dapat dibebaskan untuk kepentingan publik. Sementara pengadaan bahan diupayakan dalam bentuk swadaya, begitu juga dengan jasa pekerjaan seperti upah tukang dan lainnya. Keterlibatan dunia usaha dalam pekerjaan ini diupayakan masyarakat melalui pengajuan proposal untuk membantu pembiayaan.

Partisipasi masyarakat selama pelaksanaan manunggal terlihat dari pelaksanaan pekerjaan secara gotong royong, bantuan makanan dan minuman oleh warga serta bantuan dalam bentuk materil maupun non materil lainnya.



Rata-rata setiap kelurahan dapat menyelesaikan 2 – 3 bangunan fisik berupa pembukaan jalan baru, pembuatan pos ronda, pos yandu, membangun dan memperbaiki gedung serbaguna, pembangunan dan perbaikan madrasah, pembuatan jembatan, jalan lingkung dan pembangunan fisik lainnya. Dari sisi pendanaan, setiap kali manunggal sakato, di setiap kelurahan dapat dihimpun dana ratusan juta yang langsung dimanfaatkan untuk pembangunan fisik.

Program dan kegiatan pendukung pencapaian target ini dilaksanakan di Kantor Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Kelurahan dan Nagari, Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

Kegiatan Manunggal



Kegiatan Manunggal



2. Perusahanan /Dunia Usaha Yang Berpartisipasi Membiayai Program Pemerintah Daerah Melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan

<p><i>Perusahanan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan</i></p>	<p>=</p>	<p><i>Jumlah perusahaan dunia usaha yang berpartisipasi membiayai program pembangunan dengan dana tanggung jawab sosial 3</i></p> <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> <p><i>Seluruh perusahaan dunia usaha yang berpotensi di Bukittinggi 5</i></p>	<p><i>x 100% =60%</i></p>
--	----------	---	---------------------------

Indikator Kinerja Utama yang juga dijadikan untuk mengukur pencapaian Sasaran Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat adalah Perusahanan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai



Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan. Pada tahun 2016 ditargetkan 70%, dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi, realisasi 60% dengan persentase capaian 85%.

Seluruh perusahaan/ dunia usaha yang berpotensi di Bukittinggi terdiri dari Pertamina, PLN, Telkom, Perbankan, dan Pos Indonesia sedangkan Perusahan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan diantaranya adalah Pertamina, BNI, dan PLN.

Pada tahun 2016, Bukittinggi mendapatkan bantuan pembangunan fisik dari Pertamina senilai Rp. 1.020. juta untuk pembangunan Mushalla sebesar Rp. 600.000.000,- dan sambungan rumah untuk mengaliri air perpipaan dari sumber sumur air dalam sebesar Rp. 420.000.000,-. Dari Perusahaan Gas Negara, Bukittinggi juga mendapatkan bantuan pembangunan MDA senilai Rp. 400.000.000,-. Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bukittinggi juga sudah mendapat persetujuan untuk pembangunan Gapura Gerbang masuk kota, dengan pembangunan fisiknya pada tahun 2017. Begitu juga dengan PT PLN yang akan melaksanakan pembangunan pasar bawah yang akan dilaksanakan setelah penyempurnaan DED pada tahun 2017.

Keberhasilan Kota Bukittinggi mendapatkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) merupakan upaya yang langsung dilakukan oleh Walikota Bukittinggi, dengan memaparkan rencana kerja pemerintah dan visi serta misi kota. Sementara kegiatan pendukung difasilitasi oleh Pemerintah Kota Bukittinggi dalam bentuk kemudahan perizinan pembangunan fisik, serta membantu fasilitasi lapangan. Hal ini didukung oleh Dinas Pekerjaan Umum, Badan Pelayanan Perizinan Perizinan dan Penanaman Modal, serta Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan.

**TUJUAN 1.2 : MENINGKATNYA AKTIFITAS GENERASI MUDA
DALAM PENGALIAN POTENSI DIRI (SENI, BUDAYA
DAN OLAHRAGA)**



Tujuan kedua dari misi 1 ini didukung oleh sasaran strategis sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS 1.2.1

Meningkatnya Event Generasi Muda Dalam PEMBERDAYAAN Kesenian, Adat dan Budaya

Capaian terhadap Sasaran strategis 1.2.1 ini diukur berdasarkan capaian Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian 2 (dua) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda	52 event	52 event	100%
2.	Sanggar seni yang aktif	7 sanggar	8 sanggar	114%
Rata-rata Capaian				107%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 107%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Event Kesenian, Adat Dan Budaya Bagi Generasi Muda

<i>Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda</i>	=	<i>Jumlah seluruh event kesenian dan budaya bagi generasi muda dalam satu tahun terealisasi 52 event</i>
---	---	--

Sesuai target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi, selama tahun 2016 telah diselenggarakan even kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda di Bukittinggi sebanyak 52 event. Pelaksanaan event tersebut adalah pada tingkat kota, yang terdiri dari Penampilan Atraksi Seni dan Budaya di Pelataran Jam Gadang setiap



sabtu malam sebanyak 48 kali, menampilkan seluruh sanggar yang ada, baik tingkat kota, sanggar tingkat kecamatan, kelurahan, ataupun sanggar seni, adat dan budaya yang dimiliki oleh sekolah-sekolah yang ada di Bukittinggi.

Pertunjukkan kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda juga ditampilkan dalam bentuk Festival Multi Etnis Bukittinggi, Peringatan Hari Jadi Kota Bukittinggi, Festival Akuistik Jam Gadang dan Pemilihan Duta Wisata Bukittinggi. Semua penampilan tersebut melibatkan generasi muda dan ditampilkan sebagai panggung hiburan rakyat, yang secara umum ditampilkan di pelataran Jam Gadang.

Apresiasi dalam bentuk penampilan sanggar seni, adat dan budaya bagi generasi muda berdampak terhadap pertumbuhan sanggar seni yang aktif, yang melibatkan elemen masyarakat, baik dunia swasta, maupun elemen masyarakat lainnya yang bergerak dalam pembinaan kesenian, adat dan budaya.

Pembinaan kegiatan pendukung pencapaian indikator kinerja utama ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, bekerja dengan SKPD terkait lainnya, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga serta Pemerintahan Kecamatan, dan dunia usaha seperti perhotelan, lembaga adat dan sanggar seni yang ada di masyarakat. Kolaborasi program ini diwujudkan dalam bentuk Keputusan Walikota Bukittinggi tentang Kepanitiaan acara dan event yang diangkat.

Dibandingkan data eksisting RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, pada tahun 2015 Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda berjumlah 4 event. Dengan demikian terjadi peningkatan yang sangat signifikan, dengan realisasi tahun 2016 mencapai 52 event. Hal ini merupakan kinerja pemerintah kota yang sudah berorientasi meningkatkan even daerah sebagai penarik kunjungan ke Bukittinggi, yang salah satunya dengan melibatkan generasi muda.



Event Kesenian



Event Kesenian



2. Sanggar Seni Yang Aktif

Sanggar Seni yang Aktif = Jumlah Sanggar Seni yang Aktif ada 8 sanggar

Pembinaan sanggar seni merupakan bagian penting untuk Event Generasi Muda Dalam Pemberdayaan Kesenian, Adat dan Budaya. Karena itu pada tahun 2016 ditargetkan sebanyak 7 sanggar seni aktif berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016.

Sanggar seni aktif adalah sanggar seni yang memiliki aktivitas latihan dan mengadakan pertunjukan, baik dilaksanakan secara mandiri ataupun ikut dalam even yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak ketiga.

Pada tahun 2016, sanggar seni yang melibatkan generasi muda dalam Kota Bukittinggi yang termasuk dalam kriteria tersebut, dan sudah dilibatkan dalam even tingkat kota dan tingkat provinsi adalah:



1. Sanggar puti Limo Jurai
2. Sanggar Saayun Salangkah
3. Sanggar Sakato
4. Sanggar Gastarana
5. Sanggar Ganto Minang
6. Sanggar Rang Mudo
7. Sanggar Puti Linduang Bulan
8. Sanggar si Jontiak

Sanggar seni tersebut merupakan sanggara seni tradisional yang langsung dbina oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Bukittinggi. Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi juga melibatkan insan pariwisata berupa pertunjukan pada bebera hotel yang ada di Bukittinggi. Pemerintah Kota Bukittinggi juga bekerja sama dengan agen perjalanan, dan mengatur jadwal pertunjukan di “medan nan bapaneh” dan “medan nan balinduang” di Kota Bukittinggi. Dalam even ini dihadirkan sanggar seni aktif yang telah dibina ini, sesuai kalender pariwisata yang telah disusun oleh Pemerintah Kota Bukittinggi.

Pada tahun 2015 sebagai data awal untuk membandingkan indikator kierja utama sasaran ini, tercatat sebanyak 6 sanggar seni yang aktif. Dengan pembinaan, fasilitasi dan motivasi melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, serta dukungan instansi dan lembaga terkait lainnya, terjadi peningkatan yang signifikan sanggara seni aktif menjadi 8 sanggar.



SASARAN STRATEGIS 1.2.2

Meningkatnya Event Olahraga Generasi Muda/ Kepemudaan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1.2.2. terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.2.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah event keolahragaan bagi generasi muda	6	7	116%
Rata-rata Capaian				116%

Dari tabel dapat dilihat Capaian kinerja indikator kinerja utama 1.2.2 rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 116%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**. tersebut adalah 116% dengan kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Event Keolahragaan Bagi Generasi Muda

<i>Jumlah event keolahragaan bagi generasi muda</i>	=	<i>Jumlah seluruh event keolahragaan bagi generasi muda yang diselenggarakan dalam satu tahun berjumlah 7 event</i>
---	---	---

Selama tahun 2016, even keolahragaan bagi generasi muda yang dilaksanakan untuk tingkat kota adalah sebanyak 7 event, yaitu:

1. Lomba olah raga dalam rangka Peringatan Hari Besar Nasional, yang dilaksanakan lomba gerak jalan pada tanggal 9 s/d 10 Agustus 2016, Lomba Olahraga tradisional pada tanggal 11 s/d 12 Agustus 2016, PBB dilaksaka tanggal 25 s/d 26 Oktober 2016, dan Sepak bola pada tanggal 18 s/d 27 Oktober 2016.
2. Kejuaraan Cabang Olah Raga yang dilaksanakan Taekwondo pada tanggal 21 s/d 24 maret 2016, Sepak takraw tanggal 1 s/d 5 Maret 2016, pencak silat pada tanggal 4 s/d 7 april 2016, dan judo pada tanggal 20 s/d 23 April 2016.
3. Invitasi Olahraga Basket Ball dalam bentuk Walikota Cup, yang dilaksnakan pada 8 s/d 10 dan 13 s/d 15 September 2016 di lapangan



basket atas ngarai, dengan menghadirkan klub basket generasi muda dan pelajar SMP, SMA/SMK se Kota Bukittinggi.

4. Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional yang dilaksanakan di tingkat kota, selanjutnya pengiriman atlit berprestasi ke tingkat provinsi dan nasional dengan cabang olahraga karate, pencak silat, atletik, bulu tangkis, karate, tenis meja, renang, bola volli, dan catur.
5. Lomba Olah Raga bagi Penyandang cacat/ divabel, bagi generasi muda cacat yang berpotensi, dengan mengikuti dua cabang olah raga. Selanjutnya atlit divabel Bukittinggi dikirim ke tingkat provinsi dan nasional dengan cabang olah raga bulu tangkis dan atletik pada tanggal 26 s/d 29 Juli 2016.
6. Pekan Olah Raga Pelajar yang diawali dengan seleksi tingkat kota, melibatkan seluruh sekolah yang ada di Bukittinggi, selanjutnya atlit berprestasi Bukittinggi dikirim ketingkat provinsi dan nasional
7. Lomba Olah raga generasi muda yang digelar dalam Car Free Day, dalam bentuk olah raga masal berupa senam masal, jalan santai, fun bike, dan lari marathon. Kegiatan ini dilaksanakan dua kali dalam sebulan pada hari ahad, dengan melibatkan generasi muda, dunia usaha dan lembaga generasi muda yang ada di masyarakat.

Pelaksanaan even keolahragaan generasi muda ini dilaksanakan melalui program dan kegiatan yang ada di Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Pemerintahan Kecamatan, dan melibatkan kelembagaan dan klub-klub olah raga yang ada di masyarakat, dunia usaha, sekolah dan dukungan dari Komite Olah Raga Nasional Indonesia (KONI) Kota Bukittinggi.

Berdasarkan data eksisting Jumlah event keolahragaan bagi generasi muda, terdapat 5 kali even olah raga yang melibatkan generasi muda. Dari target yang ditetapkan, terdapat 7 even pada tahun 2016. Dengan demikian, terjadi peningkatan sebanyak 2 even dari tahun sebelumnya, yang lebih didominasi oleh even keolahragaan yang melibatkan pelajar, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi.



Event Olah Raga



Event Olah Raga



TUJUAN 1.3 : MENINGKATKAN FUNGSI RUMAH IBADAH UNTUK PENGUATAN IMAN DAN TAQWA BAGI GENERASI MUDA

Tujuan ketiga dari misi 1 ini terdiri dari sasaran strategis sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS 1.3.1

Meningkatnya Fungsi Rumah Ibadah

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 1.3.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel :



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 1.3.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kelompok/ Organisasi remaja yang aktif dalam bidang keagamaan	3	4	133%
2.	Jumlah event keagamaan	3	3	100%
Rata-rata Capaian				116%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian indikator kinerja utama sasaran strategis adalah sebesar 116%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Kelompok/ Organisasi Remaja Yang Aktif Dalam Bidang Keagamaan

Kelompok/ Organisasi remaja yang aktif dalam bidang keagamaan = Jumlah Organisasi Remaja yang aktif dalam bidang Keagamaan sebanyak 4 organisasi

Kelompok/ Organisasi Remaja yang Aktif dalam bidang keagamaan merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur tingkat capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya fungsi rumah ibadah. Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, ditetapkan target kinerja sebanyak 3 organisasi remaja. Dari hasil pembinaan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi bekerja sama dengan lembaga atau instansi keagamaan lainnya seperti Kantor Kementerian Agama, MUI, Ikatan Da'i dan Muballigh Kota Bukittinggi, Ikatan Da'i Indonesia Kota Bukittinggi, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Bukittinggi dan ormas keagamaan lainnya, terdapat 4 organisasi remaja yang masuk dalam kategori aktif.

Suatu organisasi remaja dikatakan aktif ditentukan oleh bagian Kesra apabila memiliki kepengurusan sesuai AD/ ART organisasi, memiliki kesekretariatan tetap, mengadakan pertemuan kepengurusan berkala, memiliki program kerja dan melaksanakan program kerja tersebut.

Dengan demikian, di Kota Bukittinggi, organisasi remaja bidang keagamaan yang masuk dalam kategori tersebut adalah:



1. Jaringan Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (JPRMI) Kota Bukittinggi, yang sekretariatnya di Masjid Jami' Tarok Dipo, dengan kegiatan spesifik berupa pembinaan remaja masjid dalam bentuk ta'lim, dan pembinaan pemuda, pelajar dan mahasiswa di sekolah lanjutan atas dan kampus yang ada di Bukittinggi dalam bentuk mentoring keislaman.
2. Badan Koordinasi Pemuda dan Remaja Masjid Indonesia (BKPRMI) Kota Bukittinggi, yang sekretariatnya di Kemenag Kota Bukittinggi, dengan kegiatan khusus pembinaan remaja masjid di masjid-masjid yang ada di Bukittinggi dalam bentuk pelatihan.
3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kota Bukittinggi memiliki sekretariat di Pakan Labuah, dengan fokus kegiatan pembinaan keislaman mahasiswa dan kegiatan sosial lainnya.
4. Ikatan Pemuda, remaja dan mahasiswa Muhammadiyah, adalah tiga organisasi remaja dalam naungan ormas Muhammadiyah Kota Bukittinggi yang memiliki sekretariat di Masjid Muhammadiyah Tengah Sawah. Aktivitas organisasi remaja ini adalah dalam bentuk pembinaan kepemudaan dan sosial.

Pembinaan remaja masjid oleh organisasi remaja ini, mendorong aktivitas beberapa remaja masjid di Kota Bukittinggi, walaupun belum dapat dikatakan aktif. Dengan demikian, penguatan peran organisasi remaja keagamaan ini juga akan mendorong aktifnya berbagai organisasi remaja yang lainnya, untuk mendukung pembangunan di Kota Bukittinggi.

Muara semua aktifitas tersebut adalah semakin berfungsinya rumah ibadah/ masjid yang ada, dengan berbagai kegiatan, karena secara umum setiap kegiatan organisasi tersebut berbasis di masjid.

Dari sisi jumlah Kelompok/ Organisasi remaja yang aktif, dibandingkan tahun 2015 sebagai data dasar RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, tidak terjadi peningkatan dibandingkan tahun 2015. Pada tahun 2015 sudah terdata sebanyak 4 organisasi remaja aktif dalam bidang keagamaan, dan tahun 2016 ditargetkan sebanyak 4 organisasi, dan itu dapat direalisasikan.

Pembinaan yang dilakukan oleh Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi dan juga melibatkan instansi dan lembaga keagamaan



serta Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga lebih kepada memperkuat organisasi yang ada, dan sebagai percontohan untuk mendukung organisasi keagamaan pemuda lainnya. Dengan demikian pada tahun 2017, akan didapatkan hasil yang signifikan.

2. Jumlah Event Keagamaan

Jumlah Event Keagamaan = Jumlah Event Keagamaan 3 event

Jumlah event keagamaan merupakan salah satu indikator utama dari sasaran strategis meningkatnya fungsi rumah ibadah. Pada tahun 2016, terdapat 4 even keagamaan yang dilakukan di tingkat kota yang berbasis di masjid.

Jumlah even tersebut melebihi target kinerja yang telah ditetapkan, yaitu sebanyak 3 even pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016. Even penting tersebut adalah:

1. Mushabaqah Tilawatil Quran Tingkat Remaja, dalam rangkaian MTQ Tingkat Kota Bukittinggi yang diselenggarakan 5, 6 dan 7 November 2016.
2. Pelaksanaan Khatam Al quran yang diadakan pada tiap Mesjid yang memiliki TPA dan MDA se Kota Bukittinggi yang diadakan pada tiap libur sekolah.
3. Peringatan Hari jadi kota dengan menggelar acara tabligh akbar, yang diangkat oleh organisasi keagamaan remaja di pelataran jam gadang, bersamaan dengan peringatan Tahun Baru Islam 1 Maharam 1438 Hijriah. Selanjutnya juga dilakukan pertunjukan pemakaian busana muslim terbanyak dalam tajuk Bukittinggi berhijab, da tercatat dalam Museum Rekor Indonesia (MURI).

Jumlah event keagamaan bagi generasi muda pada tahun 2015 tercatat sebanyak 3 even. Pada tahun 2016 juga ditargetkan sebanyak 3 even dan dapat direalisasikan melalui dukungan, fasilitasi dan pembinaan Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Bukittinggi. Memang belum terjadi peningkatan even, karena perlu dukungan organisasi remaja berbasis keagamaan dan konsolidasi yang lebih intens dengan lembaga dan instansi terkait lainnya. Realitanya pada tahun 2016, pencapaian



target indikator kinerja utama ini masih belum didukung program dan kegiatan yang maksimal.

MTQ Kota Bukittinggi Tahun 2016



MTQ Kota Bukittinggi Tahun 2016



Khatam AlQuran Kota Bukittinggi



Tabligh Akbar Tahun 2016



MISI II : MENINGKATKAN KINERJA PEMERINTAH SECARA PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN MEMPUNYAI JIWA KEWIRAUSAHAAN

Pencapaian misi 2 yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, terdiri dari dua tujuan dan tiga sasaran strategis sebagai berikut:



No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
2.1	Mewujudkan Pemerintahan yang Profesional, transparan, akuntabel, dan memiliki jiwa kewirausahaan dalam tata kelola pemerintahan	2.1.1	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan
2.2	Mewujudkan Reformasi Birokrasi	2.2.1	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN
		2.2.2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Analisis terhadap capaian sasaran strategis pada misi 2 akan dianalisis berdasarkan capaian terhadap indikator kinerja masing-masing sasaran pada masing-masing tujuan sebagai berikut:

TUJUAN 2.1 : MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, DAN MEMILIKI JIWA KEWIRAUSAHAAN DALAM TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Tujuan pertama pada misi 2 ini, diukur berdasarkan sasaran dan capaian indikator kinerja utama berikut:

SASARAN STRATEGIS 2.1.1
Meningkatnya Kapabilitas Lembaga Pemerintahan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.1.1 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	50%	63,65%	127%
2.	Capaian Kinerja Daerah (LPPD, SAKIP)	65	63	96%
		C	CC	150%



3.	% capaian program pembentukan peraturan daerah	19 ranperda	13 ranperda	68%
Rata-rata Capaian				110%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja utama sasaran strategis adalah sebesar 110 %, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. % Pegawai Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Jabatan

$$\begin{array}{l}
 \text{\% pegawai yang} \\
 \text{memiliki} \\
 \text{kompetensi sesuai} \\
 \text{jabatan}
 \end{array}
 =
 \frac{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah pejabat struktural yang} \\
 \text{telah memenuhi kompetensi} \\
 \text{sesuai jabatannya sebanyak} \\
 \text{373 jabatan}
 \end{array}
 }{
 \begin{array}{l}
 \text{Jumlah seluruh pejabat} \\
 \text{struktural sebanyak 586} \\
 \text{jabatan}
 \end{array}
 }
 \times 100\% = 63,65\%$$

Pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, ditargetkan 50% pegawai yang menduduki jabatan memiliki kompetensi sesuai jabatannya. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja yang dilakukan, pada akhir tahun 2016 pejabat struktural di Pemerintah Kota Bukittinggi yang telah memiliki kompetensi sesuai jabatannya sebanyak 373 pejabat, dari 586 pejabat yang menduduki jabatan struktural pada Pemerintah Kota Bukittinggi. Adapun kompetensi jabatan yang dimaksud disini sesuai Perka BKN Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil meliputi kemampuan berfikir, kemampuan mengelola diri, kemampuan mengelola orang lain, kemampuan mengolah tugas dan kemampuan sosial budaya.

Untuk memenuhi kompetensi dimaksud, Badan Kepegawaian Daerah Kota Bukittinggi melakukan pengiriman pejabat untuk mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Diklat teknis serta diklat khusus terkait jabatan. Dismaping itu, Pemerintah Kota Bukittinggi juga memberi kesempatan kepada pejabat struktural untuk mengikuti seminar, sosialisasi, workshop, kursus dan sebagainya.



Sebelumnya BKD Kota Bukittinggi sudah melakukan assesment seluruh pejabat untuk mengetahui kompetensi dan pemetaan pejabat yang ada, dan selanjutnya dilakukan perencanaan Diklat yang dibutuhkan untuk memenuhi kompetensi pejabat sesuai jabatannya. Berdasarkan pemetaan tersebut dilakukan perencanaan diklat, evaluasi pelaksanaan dan hasil diklat. Terkait dengan itu, juga dilakukan mutasi berupa rotasi ataupun penyesuaian kompetensi pejabat dengan jabatan yang didudukinya.

Persentase pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya sesuai data dasar pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, pada tahun 2015, baru 50% pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatannya. Target tahun 2016 juga belum melebihi kondisi eksisting ini, namun realisasinya sudah mencapai 63,65%. Terjadi peningkatan yang signifikan, melalui assesment yang dilakukan tahun 2016, dilanjutkan dengan mutasi berupa rotasi dan penyesuaian pejabat sesuai dengan kompetensi jabatannya. Sejalan dengan penyusunan Organisasi Perangkat Daerah yang baru, juga dilakukan pemetaan jabatan dan pejabat yang akan menempati. Untuk jabatan tinggi pratama, pengisian masih dilakukan melalui pengukuhan dan jab fit, selanjutnya ditahun 2017 dilakukan seleksi, sesuai ketentuan pengisian jabatan tinggi pratama.

2. Capaian Kinerja Daerah (LPPD, SAKIP)

<i>Capaian Daerah (LPPD, SAKIP)</i>	<i>Kinerja</i>	=	<i>Peringkat nasional LPPD 63 dan Capaian SAKIP CC</i>
---	----------------	---	--

Penilaian terhadap penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kota Bukittinggi tahun 2016 adalah penilaian terhadap penyusunan LPPD tahun 2015, yang dilakukan secara berjenjang, oleh pemerintah provinsi dan nasional. Penilaian tingkat nasional dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, berdasarkan indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.



Pemerintah Kota Bukittinggi menempati posisi 63 dari seluruh kota yang ada, dimana pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 ditargetkan pada peringkat 65. Dengan demikian capaian kinerja ini melebihi target yang ditetapkan, walaupun posisi ini masih berada pada tingkat bawah dari 93 kota yang ada di Indonesia. Dengan demikian target tahun 2017 akan lebih ditingkatkan dengan pemenuhan seluruh indikator kinerja kunci yang telah ditetapkan.

Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 adalah penilaian terhadap evaluasi SAKIP tahun 2015, dimana Pemerintah Kota Bukittinggi memperoleh nilai CC dengan poin 50,34. Dibandingkan dengan capaian yang ditargetkan pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, terdapat peningkatan, dimana target yang ditetapkan adalah C. Namun demikian, capaian Kota Bukittinggi masih belum maksimal untuk seluruh kategori yang dievaluasi, meliputi perencanaan kinerja yang belum memiliki indikator kinerja utama yang terukur dan relevan. Dari sisi pengukuran kinerja belum maksimal, terlihat dari perjanjian kinerja yang belum ditindaklanjuti sampai ke tingkat eselon III dan IV. Dari sisi pelaporan kinerja belum menganalisis ke tingkat sasaran dan program, melainkan lebih kepada capaian kegiatan. Evaluasi internal belum dilakukan dalam bentuk monitoring yang konsisten, sehingga belum memberikan umpan balik terhadap perbaikan kinerja berikutnya. Dan untuk capaian kinerja juga belum maksimal menginformasikan capaian kinerja sasaran.

Menyikapi hal tersebut, dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil evaluasi dimaksud untuk dilakukan penyempurnaan dengan melibatkan SKPD kunci dan seluruh SKPD terkait lainnya.

Penyempurnaan tersebut meliputi:

- a. Reviu dokumen perencanaan secara mendalam meliputi tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama, dan indikator kinerja yang relevan, spesifik dan terukur serta keterkaitan seluruh sasaran hingga kegiatan SKPD dengan RPJMD dalam bentuk cascading. Upaya ini dilakukan oleh Badan Perencanaan dan Litbang dan melibatkan seluruh SKPD;



- b. Reviu dokumen perencanaan untuk penyempurnaan program SKPD dengan urusan yang dilaksanakan serta kegiatan yang tepat (output) untuk pencapaian outcomes dari indikator kinerja sasaran tingkat SKPD dan kota. Kegiatan ini juga dilaksanakan oleh Badan Perencanaan dan Litbang dengan seluruh SKPD;
- c. Melakukan penyusunan rencana kerja dan anggaran lebih awal untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas belanja, serta menyiapkan ASB dan SBU, sebagai upaya untuk mempertahankan komposisi belanja pegawai lebih kecil dari belanja langsung. Langkah kerja ini disiapkan oleh Badan Perencanaan dan Litbang serta Pengelola Keuangan, melibatkan seluruh SKPD;
- d. Reviu dokumen perencanaan dan anggaran oleh Inspektorat harus berorientasi kepada pencapaian kinerja dan anggaran berbasis kinerja. Hal ini dilakukan oleh Inspektorat Daerah dengan pemaparan hasil evaluasi untuk perbaikan dan penyempurnaan;
- e. Penyamaan persepsi seluruh pimpinan SKPD dipimpin langsung oleh pimpinan daerah, dengan dukungan dari pemerintah provinsi dan kementerian terkait.

Dibandingkan kondisi tahun 2015, terjadi peningkatan kinerja Capaian Kinerja Daerah (LPPD dan SAKIP). Pada tahun 2015, EKPPD dalam penyusunan LPPD, Bukittinggi berada di rangking 72, dan tahun 2016 sudah meningkat ke posisi 63. Sementara evaluasi terhadap SAKIP juga terjadi peningkatan dari C menjadi CC. Capaian ini merupakan hasil dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bappeda, Inspektorat dan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah, didukung oleh seluruh SKPD.

3. Persentase Capaian Program Pembentukan Peraturan Daerah

% capaian program pembentukan peraturan daerah	Jumlah ranperda yang telah disepakati dalam bentuk nota kesepakatan berjumlah 13 ranperda	x 100% = 68%
	Jumlah ranperda yang dimuat dalam program pembentukan peraturan daerah sebanyak 19 ranperda	



Pada tahun 2016, telah ditetapkan sebanyak 19 Ranperda yang akan dimuat dalam Keputusan DPRD Bukittinggi, baik berupa Ranperda yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi, maupun yang menjadi inisiatif DPRD Kota Bukittinggi. Sementara itu, pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, ditargetkan sebanyak 19 Ranperda ini akan dibahas dan disepakati bersama dalam Nota Kesepakatan antara pemerintah kota dengan DPRD.

Sampai akhir tahun 2016, sebanyak 13 ranperda telah disepakati dalam nota kesepakatan, dan juga ditindaklanjuti dengan registrasi sehingga dapat ditetapkan penomorannya. Ranperda yang telah disepakati dan ditetapkan adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah
2. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 02 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga
3. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015
4. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021
5. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penambahan Pernyataan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat.
6. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Trayek
7. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016
8. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah



10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 10 Tahun 2016 tentang Retribusi Izin Gangguan
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 11 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan
12. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Perseroan terbatas Bank Pembangunan Daerah Sumatera Barat
13. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2017.

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah kota dan DPRD Kota Bukittinggi untuk menuntaskan pembahasan dan penyepakatan ranperda tersebut antara lain dengan menjalin kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, serta mendorong SKPD untuk mempercepat penyusunan rancangan Peraturan Daerah, serta dengan kelengkapan berkas yang diajukan ke Kanwil sehingga harmonisasi Ranperda lebih cepat dilakukan.

Pada tahun 2015, % capaian program pembentukan peraturan daerah terealisasi sebanyak 16 peraturan daerah. Namun pada tahun 2016 hanya terealisasi 13 Peraturan Daerah dari 19 Peraturan Daerah yang ditargetkan. Kondisi ini disebabkan durasi persiapan dan pembahasan beberapa peraturan daerah yang relatif lama, karena merupakan peraturan baru dan perlu pembelajaran bagi SKPD dan DPRD sendiri, diantaranya adalah:

- a. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Peraturan daerah ini disusun dalam kondisi belum lengkapnya aturan pelaksana turunan dari Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sementara Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri dalam Negeri sebagai petunjuk teknisnya belum ditetapkan. Kondisi ini membutuhkan ketentuan transisi yang tidak serta merta dapat diacu oleh pemerintah, begitu juga DPRD.



- b. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagai tindak lanjut ditetapkannya UU 23 Tahun 2014. Pemerintah menerbitkan PP 18 Tahun 2016 sebagai petunjuk pelaksanaan, namun belum diikuti dengan Peraturan Menteri yang diamanatkan dalam PP tersebut. Sementara proses pentipean urusan juga butuh waktu yang relatif lama, membutuhkan data teknis dan diproses melalui aplikasi yang baru dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Proses ini butuh waktu yang relatif lama dan proses pembelajaran oleh DPRD, serta verifikasi dan validasi oleh Pemerintah Provinsi.

TUJUAN 2.2 : MEWUJUDKAN REFORMASI BIROKRASI



SASARAN STRATEGIS 2.2.1

**Terwujudnya Pemerintah Bersih dan Bebas
KKN**

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 2.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 2.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP	100%
Rata-rata Capaian				100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) capaian indikator kinerja utama sasaran strategis untuk mengukur terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN adalah sebesar 100%. Sesuai kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis ini termasuk kategori **sangat baik**.



1. Opini BPK terhadap Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah

Opini BPK terhadap Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah = Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah tahun sebelumnya mendapatkan WTP

Pemerintah Kota Bukittinggi sudah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah semenjak tahun 2014. Diawali dengan LKPD tahun 2013, dan LKPD tahun 2014, yang masih ada catatan dari BPK RI. Opini WTP yang diperoleh Pemerintah Kota Bukittinggi tahun 2016 terhadap LKPD Tahun 2015 merupakan WTP murni, dan penerapan Akuntansi Pemerintah berbasis acrual dalam pelaporan. Dengan demikian, Pemerintah Kota Bukittinggi sudah siap untuk menerapkan SAP secara penuh dalam pengelolaan keuangan daerah, meliputi perencanaan, perbendaharaan, pembukuan dan pengelolaan aset.

Kondisi LKPD ini juga menggambarkan tata kelola keuangan secara menyeluruh pada seluruh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Bukittinggi. Hal ini didukung oleh sistem dan prosedur yang telah dibuat dan diterapkan secara konsisten dengan sumber daya manusia pengelola keuangan yang kompeten di SKPD pengelola keuangan dan seluruh SKPD yang ada.

Hal penting lain yang mendukung pencapaian WTP ini adalah pengawasan dan monitoring secara berkala dan konsisten, serta pembinaan secara rutin kepada seluruh SKPD. Keberhasilan Kota Bukittinggi juga didukung dengan evaluasi dan audit dari inspektorat secara rutin dan berkala, serta pembinaan melalui klinik pengawasan, monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan yang lebih intensif.

Untuk melakukan tugas-tugas ini, aparatur pengelola keuangan dan pengawasan difasilitasi dalam bentuk bimtek/ couching serta pelatihan, baik dengan mengutus peserta, ataupun dilakukan dalam bentuk Pelatihan Kantor Sendiri. Dengan demikian, kemampuan pengelolaan keuangan oleh SKPD semakin meningkat, kemampuan dan keahlian aparatur pengawas juga demikian, sehingga temuan pemeriksaan yang berulang semakin menurun.



Dalam pengelolaan aset juga terjadi peningkatan penyelesaian masalah aset dan ketepatan pengelolaannya, sehingga meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan aset daerah.

Mendukung pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Bukittinggi telah memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang terintegrasi. Dengan aplikasi ini, terjadi kecepatan pengelolaan keuangan, sekaligus akurasi dan ketepatan dalam penyajiannya.

Dengan capaian WTP ini, maka berbagai kasus yang bermuara pada terjadinya KKN di Kota Bukittinggi sudah sangat kurang dan dapat diminimalisir.

Dibandingkan tahun 2015, Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah Kota Bukittinggi juga sudah memperoleh WTP. Pada tahun 2016 Pemerintah Kota Bukittinggi juga memperoleh WTP terhadap LKPD tahun 2015, namun terjadi peningkatan dari sisi catatan yang sudah tidak ada lagi, serta merupakan laporan pertama menggunakan Acrual Basic sesuai Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah.

MISI III : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN, PENATAAN DAN PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

Untuk mewujudkan misi 3 ini, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tujuan dan sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
3.1	Meningkatkan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota Secara Terpadu Berwawasan Lingkungan	3.1.1	Terpenuhinya RTH Kota
		3.1.2	Pemenuhan Target Universal Access (saniasi, air bersih dan permukiman kumuh)
3.2	Peningkatan Penataan Ruang Kota	3.2.1	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota



No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
3.3	Menjadikan Bukittinggi Sebagai Kota Pusaka Nasional dan Dunia	3.3.1	Meningkatkan Pelestarian benda cagar budaya (BCB)
		3.3.2	Meningkatkan pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama
3.4	Terwujudnya pelayanan lalin dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib lancar dan terpadu	3.4.1	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas
3.5	Meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dan lembaga pemerintahan terhadap bencana	3.5.1	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat terhadap bencana

Untuk menggambarkan capaian terhadap misi 3 ini akan disajikan analisis masing-masing tujuan dan sasaran strategis berdasarkan capaian indikator kinerja utama sebagai berikut :

TUJUAN 3.1 : MENINGKATKAN PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KOTA SECARA TERPADU BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan pertama dari misi 3 ini diukur berdasarkan indikator utama dari sasaran strategis berikut :



SASARAN STRATEGIS 3.1.1

Terpenuhinya RTH Kota

Capaian sasaran startegis 3.1.1 ini diukur berdasarkan capaian 2 (dua) indikator kinerja utama, seperti pada tabel dibawah ini :



CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	% RTH Publik	8%	8%	100%
Rata-rata Capaian				100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 100%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Persentase RTH Publik

$$\% \text{ RTH Publik} = \frac{\text{Luas ruang terbuka publik } 203,2 \text{ Ha}}{\text{Luas wilayah kota } 2523,9 \text{ Ha}} \times 100\% = 8\%$$

Berdasarkan UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Daerah, menyebutkan bahwa Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Aturan ini mengamanatkan penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dari luas wilayah sebanyak 30%, yang terdiri dari 20% RTH Publik dan 10% RTH Privat. RTH Publik merupakan areal yang dikuasai oleh pemerintah daerah sebagai lahan konservasi dan tidak bisa dijadikan sebagai lahan budidaya. RTH dapat berupa taman kota, hutan kota ataupun ruang terbuka lainnya.

Pencapaian luasan RTH menjadi target yang akan dicapai sampai akhir masa RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021, sementara distribusinya dimuat dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2006 –2030.

Pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 pemenuhan RTH Publik ditargetkan 8% dari seluruh luas wilayah kota. Realisasi pemenuhan target tersebut sampai akhir tahun 2016 adalah seluas 203,2 Ha.



Pemenuhan RTH Publik pada tahun 2016 dioptimalkan melalui penguasaan tanah milik pemerintah untuk taman kota, dan peningkatan kualitas taman kota yang ada sehingga dikuatkan sebagai RTH Publik.

Kemudian pemenuhan RTH Publik juga dilakukan dengan melakukan penambahan media jalan sebagai jalur hijau. Secara teknis penguasaan lahan dan pembangunan RTH dilakukan melibatkan SKPD dan lembaga teknis terkait lainnya.

Data tahun 2015, Persentase RTH Publik Kota Bukittinggi adalah sebanyak 7,78%, dan tahun 2016 menjadi 8%. Terjadi peningkatan sebesar 0,02% dibandingkan tahun sebelumnya. Capaian ini sudah sesuai target yang ditetapkan tahun 2016. Penetapan target belum ningkatkan signifikan, karena pada tahun 2016 juga sedang dilakukan revisi Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 06 Tahun 2011 tentang RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030. Substansi penting pevisi RTRW ini terkait dengan perubahan RTH, untuk pemenuhan target sesuai ketentuan penataan ruang daerah.

Taman Ngarai Maaram



Taman Monumen Hatta



Taman Jam Gadang



Taman Panorama Ngarai sianok





SASARAN STRATEGIS 3.1.2

Pemenuhan Target Universal Access (Sanitasi, Air Bersih, Dan Pemukiman Kumuh)

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.1.2 terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.1.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	% air minum layak	93%	78%	83%
2.	% sanitasi layak	95%	72,72%	76%
Rata-rata Capaian				79,5

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 79%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **baik**.

1. Persentase Air Minum Layak

$$\% \text{ air minum layak} = \frac{\text{Jumlah penduduk yang mengakses air minum layak}}{\text{Jumlah Seluruh penduduk}} \times 100\% = 100\%$$

117.378 jiwa / *117.378 jiwa*

Air minum layak berdasarkan Permenkes no. 492/ MENKES/ PES/ IV/ 2010 adalah air minum yang dapat dikonsumsi yang secara fisik tidak berwarna, tidak berbau, berasa alami, dan jernih. Itu yang secara kasat mata, tapi yang secara parameter biologis air minum yang layak dikonsumsi harus terbebas dari bakteri E Coli dan Coliform. Selain itu kadar keasaman air juga harus berkisar antara 6,5 – 8,5 , mengandung mineral dibawah 500 (Total dissolved solid < 500), bebas dari zat kimia beracun, logam berat, pestisida, dan tidak mengandung bahan



radioaktif. Standar ini juga digunakan oleh WHO sebagai acuan syarat air minum yang layak untuk dikonsumsi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 ditargetkan 93% air minum di Bukittinggi sudah termasuk kedalam kategori air minum layak. Realisasinya baru 78% air minum yang masuk kriteria layak atau dengan tingkat capaian 83%.

Penentuan air minum layak di Kota Bukittinggi dilakukan melalui pengujian kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat, baik air minum perpipaan dan non perpipaan. Terhadap air minum perpipaan dilakukan pemeriksaan reguler oleh PDAM Kota Bukittinggi dan melaporkannya secara tertulis kepada Walikota Bukittinggi melalui Dinas Kesehatan. Sementara air minum non perpipaan, seperti air permukaan, ataupun sumur dalam dan sumber air galon yang dikonsumsi masyarakat dilakukan pemeriksaan langsung secara acak ataupun permintaan dari masyarakat.

Pemerintah Kota Bukittinggi selalu melakukan kampanye dan sosialisasi kepada masyarakat dan penyedia air minum untuk menyediakan dan mengkonsumsi air minum layak. Secara berkala juga dilakukan razia terhadap penyedia air minum galon untuk mengawasi proses penyediaan air minum, berikut sumber air yang diolah. Kegiatan ini menjadi bagian dari tugas Dinas Kesehatan dengan UPTD Labor Kesehatannya.

Upaya yang dilakukan dengan menambah sumber air baku baru selain sumber air baku permukaan baik perpipaan maupun non perpipaan.

Pada tahun 2015, Persentase air minum layak Kota Bukittinggi tercatat sebesar 90,64%. Dengan demikian terjadi peningkatan yang signifikan pada tahun 2016 dengan realisasi mencapai 100%. Hal ini menunjukkan air minum yang dikonsumsi masyarakat Bukittinggi pada tahun 2016 sudah sepenuhnya layak sesuai ketentuan Kementerian Kesehatan. Realitanya dari catatan medis di puskesmas dan rumah sakit yang ada di Bukittinggi, tidak terjadi kasus keracunan yang disebabkan konsumsi air oleh masyarakat.



2. Persentase Sanitasi Layak

$$\% \text{ sanitasi layak} = \frac{\text{Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak sebanyak } 21,074}{\text{Seluruh rumah tangga } 28,979} \times 100\% = 72,72\%$$

Pembangunan Sanitasi Kota Bukittinggi telah dirumuskan dalam Buku Putih Strategi Sanitasi Kota (SSK) yang dimuat dalam bentuk Memorandum Program integrasi program pemerintah kota, pemerintah provinsi dan nasional melalui Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR. Monitoring dan evaluasi secara nasional program ini dilakukan dalam City Sanitation Summit setiap tahunnya seluruh pemerintah kabupaten dan kota peduli sanitasi, yang tergabung dalam AKKOPSI.

Pada tahun 2016, berdasarkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi ditargetkan 95% sanitasi yang ada di Bukittinggi sudah termasuk dalam kategori sanitasi layak, dan pada akhir tahun 2019, sesuai target nasional 100% sanitasi sudah harus masuk dalam sanitasi layak. Fokus penanganan dalam memenuhi sanitasi layak ini meliputi penyediaan tangki septik baik komunal ataupun terpusat. Selanjutnya penyediaan IPLT yang juga akan diarahkan sebagai IPLT Regional karena keterbatasan lahan di Bukittinggi.

Pencapaian target kinerja ini diupayakan melalui kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kebersihan dan Pertamanan serta Kantor Lingkungan Hidup Kota Bukittinggi. Pembiayaan program juga dibiayai bersama melalui APBD pemerintah provinsi dan program Dirjen Ciptakarya Kementerian PUPR.

Keberhasilan program ini juga sangat ditentukan oleh partisipasi masyarakat, karena itu dilakukan pertemuan yang intens melalui pemerintahan kecamatan dan kelurahan dan lembaga keswadayaan masyarakat atau kelompok swadaya masyarakat yang ada pada seluruh kelurahan.

Persentase sanitasi layak Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat 93,12% sementara tahun 2016 terjadi penurunan signifikan menjadi 72,72% dari 95% yang ditargetkan. Kondisi ini merupakan penyesuaian



terhadap data pada Strategi Sanitasi Kota dan terjadinya penurunan daya dukung lingkungan.

TUJUAN 3.2 : PENINGKATAN PENATAAN RUANG KOTA

Tujuan kedua dari misi 3 ini didukung oleh beberapa sasaran strategis berikut:



SASARAN STRATEGIS 3.2.1

Pengendalian Dan Pemanfaatan Ruang Kota

Indikator Kinerja utama yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.2.1 terdiri atas 2 (dua) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	55%	85%	154%
2.	Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	50%	59%	118%
Rata-rata Capaian				136%

Dari tabel dia atas dapat dilihat, rata-rata capaian 2 (dua) indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 136%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Kesesuaian pemanfaatan ruang kota

$$\text{Kesesuaian pemanfaatan ruang kota} = \frac{\text{Ruang kota yang dimanfaatkan sesuai peruntukannya } 93,39}{\text{Pemanfaatan ruang kota } 100} \times 100\% = 93\%$$



Kesesuaian pemanfaatan ruang kota sesuai peruntukannya adalah salah satu implementasi dari Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030. Pengontrolannya dilakukan melalui penerbitan Rekomendasi Peruntukan Lahan, yang diterbitkan oleh Dinas PU Kota Bukittinggi sebelum penerbitan izin mendirikan bangunan.

Sementara bangunan yang didirikan tidak memiliki izin atau tidak sesuai dengan peruntukan lahan diawasi melalui razia gabungan yang melibatkan Dinas PU, SKPD layanan perizinan, Satpol PP dan pemerintahan kecamatan dan kelurahan.

Untuk bangunan khusus dalam kawasan yang lebih luas, Pemerintah Kota Bukittinggi mengoptimalkan peran Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah dan sekretariatnya di Bappeda. Badan ini melakukan analisa dan menerbitkan peruntukan lahan sesuai dengan pola ruang daerah.

Pada tahun 2016, ditargetkan 55% pemanfaatan ruang kota sudah sesuai dengan peruntukan lahan dalam pola ruang kota yang termuat dalam RTRW, sebelum ditetapkan Rencana Detail Ruang Kota. Dengan program yang ada pada Dinas PU, Bappeda dan SKPD terkait lainnya, pemanfaatan ruang kota sebanyak 85% sudah sesuai dengan peruntukan ruang.

Pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai dengan peruntukan lahan dilakukan melalui penggusuran, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Bangunan tanpa izin diharuskan mengurus izin, sementara itu juga dilakukan revisi terhadap RTRW sesuai dinamika yang berkembang di masyarakat. Hal ini dimungkinkan sesuai peraturan perundang-undangan penataan ruang daerah, setelah dilakukan peninjauan kembali dan diproses secara teknis sesuai ketentuan pemerintah.

Kesesuaian pemanfaatan ruang kota dengan RTRW Kota Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat sebesar 52%, dan pada tahun 2016 terealisasi 93%. Capaian kinerja ini didukung melalui upaya yang sudah disampaikan sebelumnya seperti penggusuran, terutama berupa bangunan tanpa izin di lahan milik pemerintah. Sejalan dengan revisi



RTRW, Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Bappeda dan Dinas PU juga melakukan penyesuaian data dengan kondisi lapangan.

2. Pelanggaran Pemanfaatan Tata Ruang Yang Dapat Ditertibkan

$$\text{Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan} = \frac{\text{Jumlah kasus pelanggaran tata ruang yang dapat diselesaikan 65}}{\text{Jumlah kasus pelanggaran tata ruang 110}} \times 100\% = 59\%$$

Pemanfaatan ruang kota yang tidak sesuai peruntukannya merupakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna ruang baik untuk mendirikan bangunan ataupun aktivitas lainnya yang tidak sesuai dengan pola ruang kota. Pelanggaran ini umumnya berupa bangunan tanpa izin, ataupun pembangunan yang dilakukan di ruang terbuka hijau ataupun non hijau, ataupun pembangunan yang dilakukan di RTH privat yang telah disyaratkan sewaktu pengurusan izin bangunan. Bentuk lainnya juga terjadi pada aktivitas yang tidak sesuai pola ruang kota, seperti usaha perdagangan dan aktivitas bisnis lainnya yang tidak sesuai dengan daya dukung lahan.

Pada tahun 2016 ditargetkan 50% pelanggaran ruang kota dapat ditertibkan, dan dapat direalisasi 59%. Penertiban ini dilakukan melalui pendekatan secara intens SK4, pembangunan RTH milik pemerintah sebagai RTH publik dengan pembangunan taman kota, hingga revisi RTRW sesuai dinamika lapangan.

Pemenuhan target secara penuh diharapkan setelah ditetapkannya Perda Revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010 – 2030 karena dinamika masyarakat yang cukup tinggi, sementara luasan kota Bukittinggi yang hanya 25 km² dan hanya 60% yang dapat dimanfaatkan, menjadi kendala dalam pemenuhan infrastruktur publik dan masyarakat. Hal ini menjadi pemicu munculnya berbagai pelanggaran yang mesti segera disikapi.

Unsur BKPRD yang bersifat lintas sektoral memungkinkan berbagai pelanggaran terhadap pemanfaatan ruang dapat ditertibkan, namun juga sangat penting menumbuhkan kesadaran masyarakat, sehingga terwujud partisipasi masyarakat dan mengurangi potensi pelanggaran lainnya.



Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 40%, dan tahun 2016 meningkat menjadi 59%. Terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun sebelumnya didukung oleh program pada Dinas PU dan razia terpadu SK4 serta pembangunan taman kota di lahan pemerintah yang sebelumnya dikuasai masyarakat.

TUJUAN 3.3 : MENJADIKAN KOTA BUKITTINGGI SEBAGAI KOTA PUSAKA NASIONAL DAN DUNIA

Tujuan ini terdiri dari beberapa sasaran strategis sebagai berikut:

	<p>SASARAN STRATEGIS 3.3.1 Meningkatkan Pelestarian Benda Cagar Budaya (BCB)</p>
--	--

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.3.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.3.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Benda cagar budaya yang lestari	5	6	120%
Rata-rata Capaian				120%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 120%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.



1. Benda Cagar Budaya Yang Lestari

Benda cagar budaya yang lestari = Jumlah benda cagar budaya yang lestari 6

Pelestarian benda cagar budaya telah diatur dalam Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah. Pada tahun 2016 ditargetkan pada Perjanjian Pemerintah Kota Bukittinggi sebanyak 5 benda cagar budaya yang dilestarikan. Melalui kegiatan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dilaksanakan pelestarian terhadap 6 benda cagar budaya, yaitu:

1. Jam Gadang
2. Lobang Jepang
3. Benteng Fort De kock
4. Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga
5. Rumah Kelahiran Bung Hatta
6. Rumah Adat Nan Baajuang.

Pelestarian benda cagar budaya tersebut dilakukan dalam bentuk kegiatan rehabilitasi, yang penyusunan perencanaan teknis (DED) nya dilakukan dengan berkonsultasi dan dibawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya Nasional wilayah Sumatera Barat. Rehabilitasi yang dilakukan tetap mempertahankan bentuk bangunan asli dengan penggantian material sesuai jenis material lama yang digunakan. Sementara fungsinya tetap dan sesuai fungsi lama, seperti untuk peningkatan kualitas daya tarik wisata dan pendidikan.

Pelestarian benda cagar budaya ini mendapat dukungan langsung melalui program kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata melalui Dana Tugas Pembantuan. Untuk beberapa bangunan dialokasikan langsung melalui APBD Kota Bukittinggi yang dilaksanakan oleh SKPD terkait, dengan pendampingan teknis oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi.



Pada tahun 2015 benda cagar budaya yang dapat dilestarikan tercatat sebanyak 5 BCB, dan pada tahun 2016 bertambah 1 BCB, yaitu Rumah Adat Nan Baanjuang. Pelestarian Rumah Adat Nan Baajuang merupakan program Pemerintah Kota Bukittinggi yang didukung dengan Dana Tugas pembantuan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Secara teknis pelaksanaan kegiatan ini dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan tim teknis dari Dinas PU, dibawah pengawasan Balai Pelestarian Cagar Budaya Naional Wilayah Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau.

Jam Gadang



Lobang jepang



Benteng Fort De Kock



Rumah Adat Nan Baanjuang



SASARAN STRATEGIS 3.3.2

Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama



Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.3.2 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.3.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	1	1	100%
Rata-rata Capaian				100%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 100%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Penambahan Pembenahan Bangunan Bernilai Sejarah, Adat, Budaya Dan Agama

$$\text{Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama} = \text{Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama berjumlah 1}$$

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Cagar Budaya dan Peninggalan Sejarah, sudah ditetapkan benda cagar budaya yang perlu dilestarikan. Pada tahun 2016 Pembenahan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Bukittinggi adalah Rumah Kelahiran Bung Hatta dengan melakukan pengecatan pada bangunan dan rehab/ perbaikan kamar mandi/ WC. Dengan demikian pada tahun 2016 terjadi penambahan 1 benda cagar budaya yang dibenahi. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD Kota Bukittinggi Tahun 2016, yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dibawah



pengawasan Teknis Dinas PU dan konsultasi ke Balai Cagar Budaya.

Pada tahun 2015 sesuai data pada RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021, belum terdapat pembenahan, atau 0. Dengan demikian sesuai target pada tahun 2016 terjadi penamnanan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama sebanyak satu bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama.

TUJUAN 3.4 : TERWUJUDNYA PELAYANAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN YANG AMAN, SELAMAT, TERTIB, LANCAR DAN TERPADU

Tujuan ini terdiri dari beberapa sasaran strategis sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS 3.4.1
Terciptanya Keamanan, Keselamatan, Ketertiban Dan Kelancaran Berlalu Lintas

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.4.1 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.4.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	81%	100%	123%
2.	Fasilitas Keselamatan Jalan	71%	70%	98%
3.	Jalan berkondisi baik	86%	85,67%	99,6%
Rata-rata Capaian				106%



Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 106%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**

1. Cakupan Daerah Yang Terlayani Angkutan Umum

$$\text{Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum} = \frac{\text{Jumlah wilayah yang telah terlayani angkutan umum sebanyak 24 wilayah}}{\text{Jumlah wilayah yang harus dilayani angkutan umum sebanyak 24 wilayah}} \times 100\% = 100\%$$

Kepadatan rata-rata penduduk kota Bukittinggi adalah sebesar 4.500 jiwa/ km², dan tidak merata untuk setiap wilayah kecamatan yang ada. Kecamatan dengan kepadatan penduduk terbesar adalah Kecamatan Guguk Panjang mencapai 6.500 jiwa/ km². Sementara wilayah terluas kota Bukittinggi adalah Kecamatan Guguk Panjang dengan kepadatan rata-rata yang lebih rendah. Kondisi ini menyebabkan beberapa wilayah pada kecamatan tersebut belum terlayani angkutan umum perkotaan. Pada tahun 2016 ditargetkan 81% wilayah kota sudah terlayani angkutan umum perkotaan. Wilayah dilihat berdasarkan wilayah kelurahan yang ada. Dengan target ini diharapkan terjadi peningkatan kelurahan yang dilayani angkutan umum perkotaan. Melalui program dan kegiatan pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi, didukung oleh organisasi daerah penyediaan angkutan umum (Organda) target ini dapat dipenuhi.

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah dengan melakukan kajian terhadap wilayah baru yang belum terlayani transportasi untuk menampung kebutuhan masyarakat, melakukan sosialisasi dan kesepakatan dengan organda, selanjutnya penerbitan izin trayek berikut armada yang melakukan pelayanan. Efektifitas pemberlakuan aturan ini dilakukan dalam bentuk monitoring, pengawasan dan pembicaraan berkala antara Dinas Perhubungan dan pihak organda dan pemilik kendaraan umum. Dukungan masyarakat



juga dilakukan melibatkan pemerintahan kecamatan dan kelurahan, serta pengelola fasilitas publik yang dilayani rute angkutan.

Permasalahan yang dihadapi adalah masih rendahnya volume penumpang yang diangkut, sehingga frekwensi angkutan juga menjadi berkurang. Akhirnya penumpang mencari alternatif angkutan, dan berdampak pada rute yang telah ditetapkan. Intensitas pertemuan dan dukungan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, akan dapat mengatasi persolan ini, sehingga rute trayek yang telah ditetapkan dapat berjalan.

Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum di Bukittinggi pada tahun 2015 adalah sebanyak 80%. Pada tahun 2016 seluruh wilayah Kota Bukittinggi sudah terlayani angkutan umum, atau terealisasi 100%. Dengan demikian tidak ada lagi wilayah kota yang tidak terlayani angkutan, namun terus dibutuhkan koordinasi dan pengawasan, sehingga seluruh trayek berjalan efektif.

Penerimaan Penghargaan WTN



Penerimaan Penghargaan WTN



2. Fasilitas Keselamatan Jalan

$$\text{Fasilitas Keselamatan Jalan} = \frac{\text{Jumlah fasilitas keselamatan jalan sebanyak 214 fasilitas}}{\text{Jumlah fasilitas keselamatan jalan yang harus dipenuhi sebanyak 305 fasilitas}} \times 100\% = 70\%$$

Perlengkapan jalan merupakan kebutuhan primer untuk suatu jalan yang akan dioperasikan, tanpa adanya perlengkapan jalan maka jalan yang sudah ada atau yang baru dibangun tidak termasuk jalan yang berkeselamatan. Berdasarkan UU no 22 tahun 2009 tentang Lalulintas



dan Angkutan Jalan, perlengkapan yang dimaksud pasal 25 ayat 1 meliputi Rambu Lalu Lintas; Marka Jalan; Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; alat penerangan Jalan; alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan; alat pengawasan dan pengamanan Jalan; fasilitas untuk sepeda, Pejalan Kaki, dan penyandang cacat; fasilitas pendukung kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang berada di Jalan dan di luar badan Jalan.

Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi telah melakukan pendataan terhadap kebutuhan fasilitas jalan berupa; Rambu jalan bersuar (traffic light, dan warning light) dan Rambu Jalan tak bersuar, Guard Rill, Cermin tikung, Marka jalan dan fasilitas lainnya. Berdasarkan pendataan tersebut dibutuhkan sebanyak 305 fasilitas jalan yang harus dipenuhi untuk memenuhi jalan berkeselamatan.

Pada tahun 2016, ditargetkan sebanyak 71% fasilitas jalan tersebut dapat dipenuhi pada seluruh jalan yang ada sesuai kebutuhannya. Realisasinya dapat dipenuhi sebanyak 214 fasilitas jalan dari 305 fasilitas jalan yang dibutuhkan atau terealisasi sebanyak 70%. Dengan demikian tingkat keberhasilan salah satu indikator utama pengukur sasaran Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas ini adalah sebesar 98%.

Upaya yang dilakukan dengan pendataan penyediaan prasarana transportasi yang optimal, peningkatan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas, peningkatan kelayakan operasional kendaraan bermotor, penataan dan perbaikan sarana prasarana yang rusak, dan kajian dan penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kendaraan dan perkembangan kota.

Hal penting yang diupayakan dalam pemenuhan fasilitas jalan ini adalah:

1. Penempatan fasilitas sesuai prioritas kebutuhan dan peta kebutuhan yang telah dilakukan berdasarkan hasil kajian dari Dinas Perhubungan;
2. Pemasangan fasilitas pada lokasi yang tepat, sehingga bermanfaat maksimal dan dapat diterima oleh masyarakat, serta mampu menyelesaikan permasalahan pada jalur lalu lintas dimaksud. Ini



dilakukan dengan survey dan kajian mendalam berdasarkan teknis keselamatan lalu lintas dan jalan raya.

Adapun program pendukung pemenuhan fasilitas keselamatan jalan ini yang dilaksanakan pada Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi berupa; pendataan penyediaan prasarana transportasi yang optimal, peningkatan kualitas manajemen rekayasa lalu lintas, peningkatan kelayakan operasional kendaraan bermotor, penataan dan perbaikan sarana prasarana yang rusak, dan kajian penambahan sarana dan prasarana yang dibutuhkan sesuai dengan perkembangan kendaraan dan perkembangan kota.

Pemenuhan Fasilitas Keselamatan Jalan sesuai kebutuhan pada tahun 2015 tercatat sebesar 70%, dan pada tahun 2016 juga masih tercatat sebesar 70%, dari 71% yang ditargetkan. Hal ini terjadi karena kegiatan tahun 2016 lebih diarahkan pada pemeliharaan dan penggantian fasilitas jalan yang rusak. Pada tahun 2016 juga tidak terdapat alokasi DAK untuk Kota Bukittinggi untuk mendukung penambahan fasilitas jalan, baik rambu ataupun marka jalan.

3. Jalan Berkondisi Baik

$$\text{Jalan Berkondisi baik} = \frac{\text{Jumlah Ruas Jalan Berkondisi baik } 154,35}{\text{Jumlah seluruh Ruas Jalan } 180,17} \times 100\% = 85,67\%$$

Jalan berkondisi baik sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2010 Tahun 2010 tentang Tata Cara dan Persyaratan Laik Fungsi Jalan, menyebutkan bahwa jalan dalam kondisi baik adalah jalan laik fungsi dengan kategori kondisi suatu ruas jalan, baik jalan baru maupun jalan lama yang sudah dioperasikan, yang memenuhi semua persyaratan teknis, meliputi geometrik jalan, teknis struktur perkerasan jalan, teknis struktur bangunan pelengkap jalan, teknis pemanfaatan bagian-bagian jalan, teknis penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas, serta teknis perlengkapan jalan. Pemenuhan persyaratan teknis laik fungsi jalan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta kondisi fisik lingkungan jalan, dan minimal



memenuhi tingkat persyaratan keselamatan dan perlindungan keselamatan.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan Keputusan Walikota Bukittinggi Nomor 188.45.117.2012 tentang Penetapan Status Ruas Jalan Sebagai Jalan Kota di Bukittinggi Tahun 2012, yang telah memuat jenis jalan, panjang dan lebar jalan serta kondisi jalan secara teknis. Adapun ruas jalan di Bukittinggi adalah sebanyak 180,17 ruas jalan, meliputi jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kota. Sesuai kewenangannya, pemerintah kota bertanggung jawab terhadap jalan kota. Dengan demikian pemeliharaan dan peningkatan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah sesuai jenis jalannya.

Pada tahun 2016 melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi ditargetkan jalan berkondisi baik 86% dan terealisasi 85,67%. Dengan demikian capaian kinerja indikator kinerja utama ini adalah sebesar 99,6%.

Pemenuhan target jalan berkondisi baik oleh Pemerintah Kota Bukittinggi pada jalan kota diupayakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Bukittinggi melalui kegiatan Pemeliharaan rutin dan berkala jalan, serta peningkatan jalan dalam kota. Pembiayaan kegiatan ini berasal dari APBD murni dan Dana Alokasi Khusus. Sementara jalan provinsi dan nasional dibiayai dengan APBD Provinsi Sumatera Barat dan APBN, melalui Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Barat.

Pelaksanaan pemeliharaan diupayakan melalui patching sesuai kondisi jalan dan bersifat temporal, sementara peningkatan jalan dilakukan melalui pekerjaan overlay secara regular sesuai ketentuan. Melalui program dan kegiatan ini, pada tahun 2016, kondisi jalan Bukittinggi dalam kondisi baik sesuai persyaratan jalan laik adalah 86,67%. Sementara jalan yang belum dalam kondisi baik umumnya adalah pada jalan provinsi dan nasional, seperti pada ruas jalan Bukittinggi – By Pass I dan jalan Soekarno Hatta, yang membutuhkan penanganan patching, pembuatan saluran dan overlay. Untuk itu Pemerintah Kota Bukittinggi telah menyurati Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah II Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya.



Ruas jalan berkondisi baik pada tahun 2015 di Kota Bukittinggi terdapat sebesar 85,2%. Pada tahun 2016 terjadi peningkatan yang tidak terlalu besar menjadi 85,67%. Penambahan ruas jalan yang berkondisi baik pada tahun 2016 tidak signifikan, karena ruas jalan by pass dan Soekarno Hatta yang merupakan kewenangan pemerintah dan pemerintah provinsi belum dapat ditangani.

TUJUAN 3.5 : MENINGKATKAN KESIAPSIAGAAN MASYARAKAT DAN LEMBAGA PEMERINTAHAN TERHADAP BENCANA

Tujuan ini terdiri dari satu sasaran strategis sebagai berikut:



SASARAN STRATEGIS 3.5.1

Meningkatnya Kesiapsiagaan Lembaga Pemerintahan Dan Masyarakat Dan Terhadap Bencana

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 3.5.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 3.5.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Fasilitas Kebencanaan	60%	71%	118%
Rata-rata Capaian				118%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 118%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.



1. Fasilitas Kebencanaan

$$\text{Fasilitas Kebencanaan} = \frac{\text{Jumlah Fasilitas Kebencanaan yang ada 133 unit}}{\text{Jumlah Kebutuhan Seluruh Fasilitas Kebencanaan 185 unit}} \times 100\% = 71\%$$

Bukittinggi merupakan salah satu wilayah di Sumatera Barat yang termasuk daerah rawan bencana. Bencana tersebut meliputi, gempa, longsor dan bencana lainnya seperti kebakaran. Karena itu fasilitas kebencanaan merupakan hal penting dalam penanggulangan bencana.

Fasilitas kebencanaan yang dibutuhkan dalam penanggulangan bencana adalah seperti yang dimuat dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2009 Tentang Standarisasi Peralatan Penanggulangan Bencana sebagai Standar Minimal Jenis Peralatan Penanggulangan Bencana yang terdiri dari 28 jenis meliputi: tenda, mobil dan truk multi fungsi, water pillow, penjernih air, velbet, genset dan lampu, vertical rescue, mega phone dan tukang.

Pada tahun 2016 ditargetkan fasilitas kebencanaan untuk Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 60%, dengan realisasi 71% dan pencapaian target rencana 118%. Adapun fasilitas kebencanaan yang sudah ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bukittinggi meliputi:

1. Kendaraan Operasional yang berjumlah 17 unit
2. Peralatan perahu evakuasi 12 unit
3. Peralatan tenda evakuasi 18 unit
4. Perlengkapan posko PB 42 Unit
5. Perlengkapan komunikasi 44 unit
6. Perlengkapan dapur

Dengan kondisi tersebut, Fasilitas kebencanaan yang perlu ditambah untuk pemenuhan kebutuhan fasilitas kebencanaan di Kota Bukittinggi diantaranya kendaraan operasional seperti ambulance dan damkar, tenda posko, tenda sekolah, tenda keluarga, tandu, genset, proyektor/ infocus, dan peralatan dapur lapangan.



Seperti Bukittinggi, daerah sekitar Bukittinggi meliputi Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota dan Tanah Datar, Pasaman dan kota yang ada, termasuk wilayah di Sumatera Barat yang masuk kategori rawan bencana. Penanggulangan bencana merupakan lintas wilayah, kabupaten kota dan bahkan provinsi. Penyediaan fasilitas kebencanaan merupakan upaya penanggulangan untuk seluruh wilayah, dan dapat dilakukan secara terintegrasi. Karena itu pemenuhan fasilitas ini juga berdampak terhadap penanggulangan bencana wilayah.

Disamping fasilitas kebencanaan yang disediakan oleh pemerintah, juga dibutuhkan dukungan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana, dalam bentuk keterampilan, dan mengenal segala bentuk dan potensi bencana, baik sebagai bentuk preventif maupun meanggulangnya.

Fasilitas Kebencanaan Kota Bukittinggi yang telah terpenuhi pada tahun 2015 adalah 50% dari kebutuhan yang diinventarisasi oleh BPBD Kota Bukittinggi. Pada tahun 2016 terealisasi 71% dari 60% yang ditargetkan. Penambahan pemenuhan fasilitas kebencanaan pada tahun 2016 di BPBD Kota Bukittinggi, selain pengadaan dari APBD Kota Bukittinggi juga merupakan pengadaan dengan dukungan APBN. Adapun pengadaan tahun 2016 meliputi: Pengadaan Kendaraan Operasional, Perahu dan tenda Evakasi, perlengkapan komunikasi dan dapur, serta peralatan petugas lapangan.

**MISI IV : MENGEMBANGKAN SISTEM EKONOMI PERKOTAAN
SECARA LEBIH BERDAYA GUNA**

Untuk mewujudkan misi 4 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tujuan dan sasaran strategis yang akan dicapai dari pelaksanaan program dan kegiatan adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
4.1	Meningkatkan peran koperasi	4.1.1	Berkembangnya Koperasi



	dan UMK dalam menunjang perekonomian Kota	4.1.2	Berkembangnya usaha mikro
4.2	Mewujudkan Perekonomian yang Sehat	4.2.1	Berkembangnya investasi
		4.2.2	Berkembangnya Industri Kecil Menengah
4.3	Meningkatnya Kesempatan Kerja Bagi Masyarakat	4.3.1	Meningkatnya lapangan kerja
4.4	Meningkatnya Penerimaan Daerah Untuk Membiayai Pembangunan	4.4.1	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Analisis capaian indikator kinerja per sasaran strategis misi IV adalah sebagai berikut

TUJUAN 4.1 : MENINGKATKAN PERAN KOPERASI DAN UMK DALAM MENUNJANG PEREKONOMIAN KOTA

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 4.1.1

Berkembangnya Koperasi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Koperasi sehat	12 koperasi	13 koperasi	108%
Rata-rata Capaian				108%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian kinerja indikator kinerja utama sasaran strategis berkembangnya koperasi aktif adalah sebesar 108%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Koperasi sehat

Jumlah Koperasi sehat

= Jumlah koperasi yang memenuhi kriteria sebagai koperasi sehat sebanyak 13 koperasi

Penilaian koperasi merupakan amanat dari Peraturan Menteri Koperasi dan UKM RI Nomor 17/R/MKUKM/IX/2015 tentang pengawasan koperasi. Penilaian terhadap koperasi ini dilakukan oleh tim penilai koperasi yang berasal dari ASN bidang koperasi yang memenuhi kriteria sesuai sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UMKM RI tersebut.

Untuk menilai kondisi koperasi, tim penilai dan pengawas koperasi berpedoman kepada Peraturan Presiden nomor 17 Tahun 2015 tentang kriteria koperasi Sehat, meliputi:

1. Skor nilai 80 s/d 100
2. Permodalan maksimal 15 skor nilai
3. Kualitas aktiva produktif maksimal 25
4. Manajemen maksimal 15
5. Eksistensi maksimal 10
6. Kemandirian Maksimal 10
7. Jati diri maksimal 10

Pada tahun 2016, di Kota Bukittinggi terdapat 105 Koperasi, dan ditargetkan sebagai koperasi sehat sebanyak 12 koperasi. Berdasarkan hasil penilaian dari Tim Penilai dan Pengawas Koperasi, maka 87 Kopersi aktif dan 13 koperasi sehat. Dengan demikian, capaian dari indikator kinerja utama sasaran berkembangnya koperasi mencapai 108%.



Keberadaan koperasi aktif ini akan mendukung aktivitas perekonomian Kota Bukittinggi sebagai kota wisata, kota perdagangan dan jasa. Sebagai sokoguru ekonomi bangsa, koperasi akan mendukung mendukung industri mikro kecil dan menengah yang menjadi penopang ekonomi kota.

Adapun 13 Koperasi Sehat Kota Bukittinggi Tahun 2016 adalah:

1. KSP Lumbuang Pusako dengan jumlah nilai 84,15
2. KPN Kecamatan Guguk Panjang dengan jumlah nilai 81,05
3. KSU Cahaya Hati dengan jumlah nilai 80,55
4. KSP Tali Kasih dengan jumlah nilai 87,45
5. Kopkar Novotel dengan jumlah nilai 81,40
6. Koppas Sadar dengan jumlah nilai 83,90
7. KPN Dinas Pendidikan dengan jumlah nilai 84,25
8. KPN BPSB TPH-V dengan jumlah nilai 81,95
9. Kopkar Swadaya Prayoga dengan jumlah nilai 81,65
10. KSU Jam Gadang Snack dengan jumlah nilai 89,65
11. KPN Husada SPK Deg. Kes RI dengan jumlah nilai 82,40
12. KSU Puro Basamo dengan jumlah nilai 86,25
13. Kopdit CU Hati Kudus dengan jumlah nilai 81,15

Pencapaian target koperasi aktif ini merupakan hasil dari program dan kegiatan Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Kota Bukittinggi melalui:

1. Pembinaan Langsung kelengkapan tempat operasional koperasi;
2. Pengawasan Langsung terhadap seluruh aktivitas dan elemen yang terkait dengan koperasi;
3. Mengadakan pelatihan di dalam dan di luar kota Bukittinggi
4. Melakukan sosialisasi untuk penerapan dari hasil pelatihan yang telah dilakukan menghadirkan narasumber yang kapabel dan berpengalaman.

Pada tahun 2015, Jumlah Koperasi sehat yang ada di Bukittinggi adalah sebanyak 11 koperasi dari seluruh koperasi yang ada. Untuk tahun 2016 dapat direalisasikan sebanyak 13 koperasi dari 12 koperasi yang ditargetkan. Pencapaian ini didukung oleh intensitas pembinaan yang



dilakukan, meningkatnya kesadaran pengurus koperasi serta dukungan ekonomi masyarakat yang masih bertumbuh di atas 6%, walaupun secara nasional masih dibawah itu.



SASARAN STRATEGIS 4.1.2

Berkembangnya Usaha Mikro

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.2 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	5 bh	5 bh	100%
Rata-rata Capaian				100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 100%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Usaha Mikro Yang Naik Kelas Menjadi Usaha Kecil

Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil = *Jumlah usaha mikro yang meningkat menjadi usaha kecil menengah sebanyak 5 usaha kecil*

Di Bukittinggi berdasarkan data pada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi tahun 2016, terdapat 5 usaha mikro. Usaha mikro ini bergerak dalam usaha perdagangan.



Melalui binaan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi terdapat 5 usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha kecil dari 5 usaha mikro yang ditargetkan pada tahun 2016. Kelima usaha mikro tersebut adalah:

1. Toko BY;
2. Toko Dania;
3. Toko Firdaus Colection;
4. Toko Ibnu; dan
5. Toko Qori.

Kelima toko ini biasanya membuka lapak kaki lima di sekitaran Jam Gadang, dan sekarang telah bisa menyewa toko di areal pasar atas.

Kelima usaha mikro ini naik kelas menjadi usaha kecil dilihat dari kriteria:

1. Kekayaan berkisar Rp. 50.000.000 s/d Rp. 500.000.000
2. Penjualannya berkisar Rp. 300.000.000 s/d Rp. 2,5 miliar/tahun

Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan usaha mikro ini menjadi usaha kecil adalah melalui pelatihan bagi seluruh usaha mikro yang ada berupa pelatihan, fasilitasi permodalan melalui sumber permodalan, fasilitasi pameran tingkat kota dan luar kota, bimbingan dan pendampingan langsung, fasilitas manajemen bisnis, menghadirkan dan mengunjungi memotivator dari pelatih dan pengusaha berpengalaman, serta mengirim pelaku UMKM mengikuti pelatihan baik di dalam kota maupun luar kota.

Pada tahun 2015 jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil berjumlah sebanyak 5 usaha mikro. Pada tahun 2016 ditargetkan masih sama sebanyak 5 usaha mikro. Target ini belum ditingkatkan pada tahun 2016 karena pada penyusunan rencana kerja tahun 2016 belum diorientasikan pencapaiannya. Dengan demikian, program dan kegiatan pendukung yang ada di Dinas Koperindag Kota Bukittinggi lebih kepada pembinaan agar UKM yang sudah naik kelas bisa bertahan dan bisa menjadi percontohan. Selanjutnya tahun 2017 akan



ditargetkan lebih banyak dengan dukungan program dan kegiatan yang lebih signifikan.



TUJUAN 4.2 : MEWUJUDKAN PEREKONOMIAN YANG SEHAT

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS 4.2.1

Berkembangnya Investasi

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.2.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Investasi	1.884	1.771	93%
Rata-rata Capaian				93%



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 93%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Investasi

Jumlah Investasi	=	Jumlah investasi yang ditanamkan di Kota Bukittinggi selama 1 tahun sebanyak Rp. 1.771 juta
-------------------------	---	--

Pembangunan sebuah kota tidak bisa dibiayai oleh pemerintah saja karena keterbatasan anggaran. Percepatan pembangunan kota membutuhkan dukungan pembiayaan dunia swasta melalui investasi. Mendukung masuknya investasi asing ataupun dalam negeri, pemerintah harus menyediakan infrastruktur pendukung, regulasi yang jelas dan iklim yang mendukung investasi, serta kejelasan dan kemudahan dalam berinvestasi.

Pada tahun 2016 ditargetkan investasi yang ditanamkan di Bukittinggi sebesar Rp. 1.884 juta, baik asing maupun dalam negeri. Untuk itu pemerintah kota melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BP2TPM) telah menyiapkan peluang investasi berikut regulasi pendukungnya. Bahkan juga telah diterbitkan profil proyek penanaman modal bidang usaha unggulan/ prioritas dan berbagai bahan promosi investasi di beberapa daerah.

Selain regulasi kemudahan berinvestasi, infrastruktur pendukung juga telah disediakan, seperti peningkatan kualitas jalan ketersediaan listrik dan telekomunikasi. Pemenuhan infrastruktur ini bahkan juga menjadi salah satu peluang investasi yang difasilitasi pemerintah.

Sampai akhir tahun 2016 jumlah investasi yang masuk ke Kota Bukittinggi berdasarkan data dari BP2TPM adalah sebesar Rp. 1.771 juta.

Pengelolaan investasi di Bukittinggi dilaksanakan dengan melakukan pengawasan, pembinaan dan pemantauan terhadap BUMN/ BUMD yang ada di Kota Bukittinggi. Sementara besaran investasi masuk Bukittinggi



diketahui melalui proses perizinan oleh perusahaan dalam negeri ataupun modal asing.

Pada tahun 2015 jumlah Investasi yang ditanamkan di Kota sebesar Rp. 1.713.000.000 dari berbagai sektor. Sementara itu pada tahun 2016 investasi yang ditanamkan di Bukittinggi terealisasi sama dengan tahun 2015, dan belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan revisi RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2016-2021 belum dapat dituntaskan, sementara beberapa lokasi yang dilirik investor sangat terkait dengan penataan ruang tersebut, seperti pembangunan hotel, dan pengembangan pasar.



SASARAN STRATEGIS 4.2.2

Berkembangnya Industri Kecil Menengah

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.2.2 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.2.2

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)	5	5	100%
Rata-rata Capaian				100%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 100%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)



Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi) = Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi) berjumlah 5

Jumlah Industri kecil menengah yang berkembang merupakan salah satu indikator utama untuk mengukur sasaran strategis berkembangnya industri kecil menengah. Pada tahun 2016 di Bukittinggi ditargetkan sebanyak 5 industri kecil dan menengah berkembang.

Untuk melihat industri kecil dan menengah berkembang diukur dari:

1. Jumlah tenaga kerja
2. Modal usaha, dan;
3. Jumlah Produksi

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kota Bukittinggi, IKM yang mengalami peningkatan dari jumlah tenaga kerja, modal dan produksi sekaligus pada tahun 2016 adalah:

1. IKM Vee Hiuse
2. IKM Sulaman/ Bordir Cendrawasih
3. IKM La Linda Boutique
4. IKM Eni Desaign
5. IKM Shintia Boutique

Pencapaian ini dilakukan melalui Program dan kegiatan Diskoperindag berupa pembinaan langsung, fasilitasi permodalan, magang, bantuan teknologi produksi dan pemasaran, melalui keikutsertaan pameran dalam dan luar daerah.

Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi) pada tahun 2015 di Bukittinggi adalah sebanyak 5 IKM. Sementara tahun 2016 juga masih ditarget sama sebanyak 6 IKM dan terealisasi 100%. Penetapan target yang sama disebabkan indikator kinerja utama ini belum didukung signifikan untuk pengembangan, dan lebih kepada pemeliharaan, dan menjadikan IKM yang ada sebagai percontohan. Untuk tahun 2017 Pemerintah Kota Bukittinggi akan menargetkan lebih sesuai Perjanjian Kinerja berikutnya.



TUJUAN 4.3 : MENINGKATNYA KESEMPATAN KERJA BAGI MASYARAKAT

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 4.3.1
Meningkatnya Lapangan Kerja

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.3.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan pencapaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.3.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,84%	6,04%	96,5%
Rata-rata Capaian				96,5%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 96,5%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka = Angka pengangguran terbuka yang dirilis BPS 6,04%



Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja yang sama sekali tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran ini terjadi karena angkatan kerja tersebut belum mendapat pekerjaan padahal telah berusaha secara maksimal atau dikarenakan faktor malas mencari pekerjaan atau malas bekerja.

Berdasarkan Target pada Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, target pengangguran terbuka adalah sebesar 5,84%. Realisasinya berdasarkan Data BPS Kota Bukittinggi yang dimuat dalam Statistik Daerah Kota Bukittinggi Tahun 2016 adalah sebesar 6,04%. Dengan demikian hasil kinerja indikator kinerja utama ini mencapai 96,5%.

Berdasarkan capaian ini, memperlihatkan jumlah pengangguran di Bukittinggi masih relatif tinggi, walaupun sudah berada di bawah provinsi dan nasional. Data ini menunjukkan dalam 100 orang angkatan kerja, sebanyak 6 orangnya adalah pengangguran.

Upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bukittinggi untuk menekan angka pengangguran ini antara lain:

1. Memberi keterampilan kepada angkatan kerja baru ataupun angkatan kerja lama yang potensial dan belum memiliki pekerjaan tetap untuk membuka dan memasuki dunia kerja;
2. Memfasilitasi bantuan permodalan melalui lembaga keuangan, baik bank maupun non bank;
3. Mencari informasi kerja melalui Jab Fair dan menyalurkan tenaga kerja yang memenuhi persyaratan;
4. Membekali calon tenaga kerja baru untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan lapangan usaha, baik lokal, regional maupun luar negeri;

Program ini dilakukan oleh Dinas Sosial dan Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Program juga dilakukan dalam bentuk kurikuler pada pendidikan kejuruan yang ada di Bukittinggi untuk berorientasi kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Bukittinggi berdasarkan data tahun 2015 adalah sebesar 6,04%, dan untuk tahun 2016 tetap sama, karena



sampai bulan Maret 2017 belum dipublikasi oleh BPS tingkat pengangguran terbuka di Kota Bukittinggi.

TUJUAN 4.4 : MENINGKATNYA PENERIMAAN DAERAH UNTUK MEMBIAYAI PEMBANGUNAN

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 4.1.1
Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 4.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 4.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Jumlah penerimaan pajak daerah	34.758.804.463	30.709.690.231	88%
Rata-rata Capaian				88%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 88%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.



1. Jumlah penerimaan pajak daerah

Jumlah penerimaan pajak daerah	=	Jumlah penerimaan pajak daerah
		Rp. 30.709.690.231

Salah satu sumber pembiayaan pembangunan berasal dari Pendapatan Asli Daerah, yang memuat Pajak dan Retribusi Daerah. Pada tahun 2016, ditargetkan Penerimaan Pajak Daerah sebesar Rp. 34,578 milyar, dan terealisasi sebesar Rp. 30, 709 milyar, atau dengan tingkat capaian 88%.

Realisasi pajak daerah ini berasal dari 9 jenis pajak diantaranya :

1. Pajak hotel berdasarkan Perda No 7 Tahun 2012
2. Pajak restoran berdasarkan Perda No. 8 Tahun 2012
3. Pajak Hiburan berdasarkan Perda No. 9 tahun 2014
4. Pajak Reklame berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2012
5. Pajak Air Tanah berdasarkan Perda No 2 Tahun 2011
6. Pajak Penerangan Jalan berdasarkan Perda No 1 Tahun 2014
7. Pajak Parkir berdasarkan Perda No 6 Tahun 2010
8. Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan Perda No 5 Tahun 2012
9. BPHTB berdasarkan Perda No. 3 Tahun 2011

Pencapaian pajak daerah diupayakan oleh Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dengan beberapa SKPD terkait. Belum maksimalnya pencapaian target ini karena beberapa program pendukung belum dapat dilaksanakan, seperti; pengadaan cash register, pengawasan hotel dan restoran dengan melibatkan pihak penegak hukum dan faktor teknis lainnya.

Untuk itu, tim intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah pada tahun 2017 dan berikutnya didorong bekerja maksimal dengan penyiapan skenario dan dilakukan secara intens, terpadu dan berkelanjutan.

Dibandingkan dengan tahun 2015, pencapaian Jumlah penerimaan pajak daerah tahun 2016 mengalami peningkatan signifikan. Pada tahun 2015 pajak daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah adalah sebesar Rp. 28.892.911.963, sementara tahun 2017 sebesar Rp. 30.709.690.231,-



walaupun belum terealisasi sebesar target yang ditetapkan. Capaian ini selain perbaikan pengelolaan penerimaan daerah dari pajak daerah, juga didukung oleh Riset Potensi Pendapatan Daerah (Rispora) yang mengkaji potensi pendapatan daerah dan rekomendasi untuk peningkatannya.

MISI V : MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA, PENDIDIKAN, KESEHATAN, PERDAGANGAN DAN JASA SERTA KESEJAHTERAAN SOSIAL MASYARAKAT

Untuk mewujudkan misi 5 tersebut, sesuai dengan Penetapan Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tujuan dan sasaran strategis dimaksud adalah sebagai berikut:

No	TUJUAN	No	SASARAN STRATEGIS
5.1	Mewujudkan Pariwisata yang Berdaya Saing	5.1.1	Meningkatnya kunjungan wisata
5.2	Mewujudkan Pendidikan yang Unggul dan Bermutu	5.2.1	Meningkatkan Mutu Pendidikan
		5.2.2	Terwujudnya pengintegrasian nilai-nilai agama, adat dan budaya dalam pendidikan
5.3	Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat	5.3.1	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan
5.4	Meningkatnya Kualitas Hidup Masyarakat	5.4.1	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarsu tamaan gender dan perlindungan anak
5.5	Mewujudkan Pusat Perdagangan dan Jasa yang Berdaya Saing	5.5.1	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan
5.6	Meningkatkan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Dan Gizi	5.6.1	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragama, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal
5.7	Meningkatkan Ketertiban, Ketentraman dan Keamanan Kota	5.7.1	Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat

Analisis capaian kinerjanya dilakukan berdasarkan capaian indikator kinerja utama per sasaran strategis sebagai berikut:



TUJUAN 5.1 : MEWUJUDKAN PARIWISATA YANG BERDAYA SAING

Pencapaian tujuan pertama pada misi 5 ini akan dicapai berdasarkan capaian indikator kinerja utama beberapa sasaran strategis berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.1.1
Meningkatnya Kunjungan Wisata

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.1.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.1.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	jumlah kunjungan wisatawan	483,950	499.806	103%
Rata-rata Capaian				103%

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja utama sasaran strategis sebesar 103%, sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Kunjungan Wisatawan

Jumlah kunjungan wisatawan = *Jumlah kunjungan wisatawan dalam satu tahun berjumlah 499.806 wisatawan*



Pariwisata merupakan sektor unggulan pendukung ekonomi Kota Bukittinggi. Salah satu sasaran yang menunjukkan pariwisata Bukittinggi berdaya saing adalah dengan memperhatikan kunjungan wisatawan ke Bukittinggi. Indikator utama yang ditetapkan untuk mengukur kunjungan wisata ke Bukittinggi adalah jumlah kunjungan wisatawan selama satu tahun, baik domestik maupun manca negara.

Pada tahun 2016 kunjungan wisatawan ke Bukittinggi ditargetkan sebanyak 483.950 wisatawan. Kunjungan ini seperti tahun-tahun sebelumnya masih didominasi oleh wisatawan domestik. Tingkat kunjungan ini dihitung berdasarkan tingkat hunian hotel yang ada di Bukittinggi.

Pada tahun 2016 jumlah kunjungan wisatawan ke Bukittinggi tercatat sebanyak 499.806 wisatawan, terdiri dari wisatawan menginap mancanegara sebanyak 27.516, wisatawan menginap nusantara 427.244, wisatawan tidak menginap mancanegara sebanyak 1.846, dan jumlah kunjungan wisatawan tidak menginap nusantara sebanyak 43.200. Jumlah kunjungan ke Bukittinggi tahun 2016 memiliki tingkat capaian 103%.

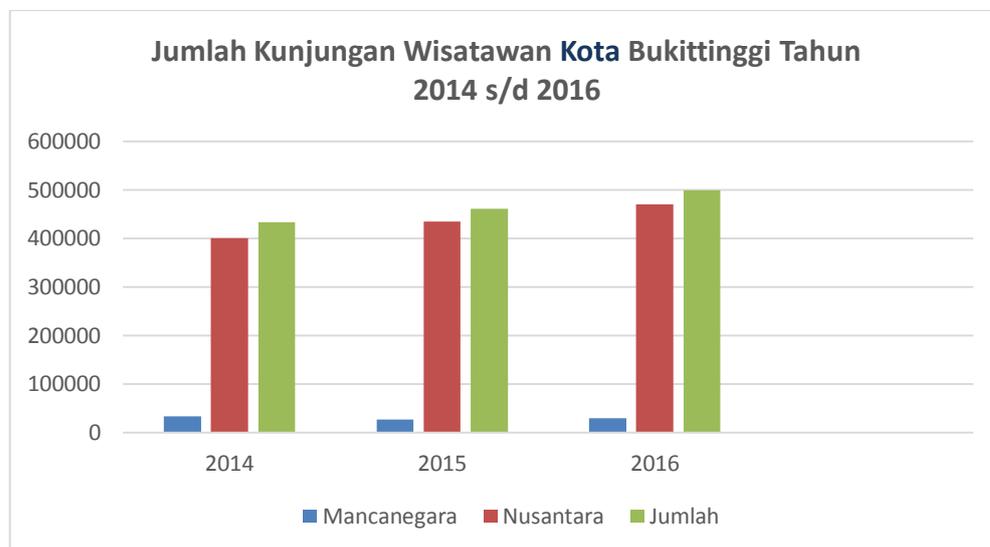
Upaya Pemerintah Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kunjungan wisatawan dilakukan melalui:

1. Promosi dalam dan luar negeri serta mengoptimalkan media online
 2. Meningkatkan even kepariwisataan
 3. Peningkatan kualitas pendukung kepariwisataan, seperti perhotelan
 4. Meningkatkan kualitas daya tarik wisata
 5. Menciptakan suasana kota yang aman, nyaman dan menyenangkan
- Pencapaian tingkat kunjungan wisata disamping menjadi tugas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga dilakukan secara terpadu dengan dukungan SKPD terkait lainnya, seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Dinas Pekerjaan Umum, dan Satpol PP.

Jumlah kunjungan wisatawan ke Bukittinggi pada tahun 2015 tercatat 460.905 wisatawan, dan tahun 2016 menjadi 499.806 wisatawan. Peningkatan ini terjadi karena peningkatan even kepariwisataan yang dilakukan sepanjang tahun 2016 dan mulai



tersebarinya kalender kepariwisataan pada biro perjalanan, serta kerjasama kepariwisataan dengan daerah kunjungan wisatawan lainnya.



TUJUAN 5.2 : MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG UNGGUL DAN BERMUTU

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.2.1
Meningkatkan Mutu Pendidikan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.2.1 terdiri atas 7 (tujuh) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.2.1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Harapan lama sekolah	14,7 tahun	14,92	79



No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
2	Angka Rata Rata Lama Sekolah	10,85 tahun	10,79	99
3.	APK PAUD (3 - 6 TH)	86,00%	79%	91
4.	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	72,88%	79%	108
5.	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	54,50%	73%	135
6.	% Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA	63,60%	82%	130
7.	% Kompetensi keahian yang berakreditasi A tingkat SMK	37,20%	42%	113
Rata-rata Capaian				107,8

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 7 (tujuh) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 107%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**

1. Harapan lama sekolah

Harapan Sekolah Lama = Lamanya sekolah yang akan dirasakan oleh anak umu tertentu pada masa datang 14,92 tahun

Harapan lama sekolah didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Variabel ini merupakan salah satu indikator dalam menentukan Indeks Pembangunan Manusia.

Pada tahun 2016, Harapan Lama sekolah yang ditargetkan pada Pemerintah Kota Bukittinggi adalah 14,7 tahun, dan terealisasi sebesar 14,92 tahun atau dengan tingkat capaian sebesar 79% Artinya, setiap anak pada usia tertentu pada tahun 2016, akan memiliki harapan untuk bersekolah pada umur tertentu selama 14,92 tahun, atau sudah sampai ke tingkat perguruan tinggi pada semester 6.

Capaian ini didukung dengan keberadaan sekolah mulai dari tingkat dasar, tingkat menengah dan perguruan tinggi yang ada di Bukittinggi sebagai berikut:



2. Sekolah Dasar/ MI negeri dan swasta sebanyak 65 sekolah
3. SMP/ MTs negeri dan swasta sebanyak 18 sekolah
4. SMA/MA/SMK negeri dan swasta sebanyak 29 sekolah
5. Perguruan tinggi negeri dan swasta sebanyak 22 perguruan tinggi

Pengelolaan dan perencanaan kebutuhan sekolah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Bukittinggi, sementara untuk jajaran pendidikan keagamaan dikelola oleh Kementerian Agama, baik tingkat kota maupun provinsi. Perguruan tinggi negeri sesuai kewenangannya dikelola oleh pemerintah, sementara keberadaannya sangat berpengaruh pada harapan lama sekolah di Bukittinggi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi terkait hal ini dalam bentuk fasilitasi.

Angka Harapan lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 14,92 tahun, dan tahun 2016 selama 14,92 tahun. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya, karena belum ada publikasi terbaru data harapan lama sekolah yang dipublikasi oleh BPS Kota Bukittinggi, walaupun data sementara terdapat peningkatan. Sesuai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, data yang menjadi ukuran adalah dari BPS Kota Bukittinggi.

2. Angka Rata Rata Lama Sekolah

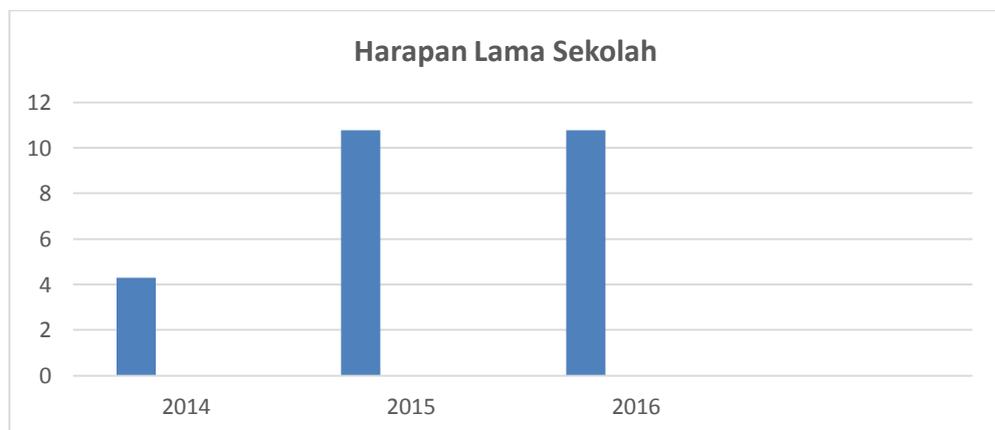
Angka Rata-rata lama sekolah = Jumlah tahun yang digunakan penduduk dalam menjalani pendidikan formal 10,79 tahun

Untuk melihat kualitas penduduk dalam hal mengenyam pendidikan formal, adalah melalui Tingginya angka Rata-rata Lama Sekolah. Angka ini menunjukkan jenjang pendidikan yang pernah/sedang diduduki oleh seseorang. Semakin tinggi angka rata-rata lama sekolah, maka semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkannya.

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Bukittinggi menargetkan 10,85 tahun, dan terealisasi 10,79 tahun atau sebesar 99%. Dengan demikian, berarti rata-rata penduduk Kota Bukittinggi usia 15 tahun sampai 45 tahun mengecap pendidikan rata-rata selama 10,79 tahun atau sampai kelas 11, setara dengan kelas 2 SLTA.



Kondisi ini didukung oleh ketersediaan sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, dan batuan pendidikan bagi anak usia pendidikan. Sementara itu juga tersedia Pendidikan Non Formal bagi anak-anak yang tidak bisa mengikuti pendidikan formal, berupa pendidikan paket A – C. Penyelenggaraan pendidikan ini dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga bekerja sama dengan pihak swasta dalam bentuk lembaga pendidikan. Sementara Pendidikan Non Formal dikelola oleh Satuan Kegiatan Belajar, yang saat ini sudah beralif fungsi menjadi Satuan Pendidikan Non Formal.



Grafik Harapan Lama Sekolah (data statistik daerah tahun 2014 s/d 2016)

Angka Rata-rata lama sekolah Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 10,79 tahun, dan tahun 2016 selama 10,79 tahun. Capaian ini masih sama dengan tahun sebelumnya, karena belum ada publikasi terbaru data rata-rata lama sekolah yang dipublikasi oleh BPS Kota Bukittinggi, walaupun data sementara terdapat peningkatan. Sesuai Indikator Kinerja Utama yang ditetapkan, data yang menjadi ukuran adalah dari BPS Kota Bukittinggi.

3. APK PAUD (3 - 6 TH)

$$\text{APK PAUD (3 - 6 TH)} = \frac{\text{Jumlah anak didik PAUD}}{\text{Jumlah Penduduk 0-6 Th}} \times 100\% = 79\%$$

3.633
4.583

Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (3-6) tahun di Bukittinggi pada tahun 2016 ditargetkan 86%, dan terealisasi 79%, atau dengan tingkat capaian sebesar 91%. APK PAUD Bukittinggi belum



mencapai 100% disebabkan belum semua orang tua memasukkan anaknya di PAUD. Sementara ketersediaan PAUD di Bukittinggi sangat memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan, karena didukung oleh lembaga pendidikan swasta.

Pada tahun 2016, di Bukittinggi masih terdapat 1 PAUD Negeri, yaitu TK Pembina, sementara PAUD swasta berjumlah sebanyak 40 PAUD dengan total anak sebanyak 2398 anak.

APK PAUD (3 - 6 TH) Kota Bukittinggi tahun 2016 adalah 85,57%, sementara tahun 2016 sebesar 79%. Terjadinya penurunan APK PAUD anak usia 3-6 tahun disebabkan tidak berkembangnya PAUD yang ada dan animo masyarakat terhadap PAUD.

4. Persentase Sekolah Yang Berakreditasi A Tingkat SD

$$\frac{\text{Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD}}{\text{Jumlah sekolah SD 63}} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A 50}}{\text{Jumlah sekolah SD 63}} \times 100\% = 79\%$$

Bukittinggi memiliki 63 sekolah dasar. Sebanyak 63 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2016 sebanyak 50 sekolah memperoleh akreditasi A, 12 sekolah terakreditasi B dan 1 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinasasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 108%, dimana target yang ditetapkan sebesar 72,88 % dan terealisasi sebesar 79%.

Untuk mendapatkan akreditasi A, fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang mencapai indikator standar penilaian yang telah dilakukan oleh BAN pusat, baik dari segi mutu dan layanan pendidikan

Penilaian akreditasi sekolah ini dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional terhadap indikator yang telah ditetapkan, meliputi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan



tenaga pendidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan dan standar penilaian pendidikan sesuai peraturan Presiden nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Pada tahun 2015 Persentase Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 71,18%, dan tahun 2016 menjadi 79%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015 didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SD yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

5. Persentase Sekolah Yang Berakreditasi A Tingkat SMP

$$\% \text{ Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A 8}}{\text{Jumlah sekolah SMP 11}} \times 100\% = 73\%$$

Jumlah Sekolah Menengah Tingkat Pertama di Bukittinggi adalah 11. Sebanyak 11 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2016 sebanyak 8 sekolah memperoleh akreditasi A, 3 sekolah terakreditasi B dan 0 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinasasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 135 %, dimana target yang ditetapkan sebesar 54 % dan terealisasi sebesar 73%.

Pada tahun 2015 Persentase SMP yang berakreditasi A di Kota Bukittinggi adalah sebanyak 54,50%, dan tahun 2016 menjadi 73%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015 didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SMP yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

6. Sekolah Yang Berakreditasi A Tingkat SMA

$$\% \text{ Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMA} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A 9}}{\text{Jumlah sekolah SMA 11}} \times 100\% = 82\%$$



Terdapat sebanyak 11 Sekolah Menengah Tingkat Atas di Bukittinggi pada tahun 2016. Sebanyak 11 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2016 sebanyak 9 sekolah memperoleh akreditasi A, 2 sekolah terakreditasi B dan 0 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinasasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 130 %, dimana target yang ditetapkan sebesar 63% dan terealisasi sebesar 82%.

Persentase SMA yang berakreditasi A di Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah sebanyak 63,60%, dan tahun 2016 menjadi 82%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015 didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SMA yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

7. Persentase Kompetensi Keahlian Yang Berakreditasi A Tingkat SMK

$$\% \text{ Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMK} = \frac{\text{Jumlah sekolah yang berakreditasi A } 5}{\text{Jumlah sekolah SMK } 12} \times 100\% = 42\%$$

Bukittinggi memiliki 12 Sekolah Menengah Kejuruan. Sebanyak 12 sekolah sudah diakreditasi, dan pada tahun 2016 sebanyak 5 sekolah memperoleh akreditasi A, 7 sekolah terakreditasi B dan 0 sekolah memperoleh akreditasi C atau belum terakredinasasi.

Berdasarkan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016, tingkat capaian kinerja dari indikator utama yang ditetapkan adalah sebesar 113%, dimana target yang ditetapkan sebesar 37% dan terealisasi sebesar 4%.

Seperti halnya sekolah yang lain untuk mendapatkan akreditasi A, fasilitasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kota Bukittinggi adalah:

1. Melakukan pembinaan terhadap sekolah-sekolah yang mencapai indikator standar penilaian yang telah dilakukan oleh BAN pusat, baik dari segi mutu dan layanan pendidikan



Mulai tahun 2017, SMA dan SMK tidak lagi menjadi kewenangan pemerintah kabupaten kota sesuai UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian pengelolaan SLTA akan menjadi kewenangan propinsi, baik pengelolaannya maupun pengembangan dan peningkatan kualitas dan mutunya.

Persentase SMK yang berakreditasi A di Kota Bukittinggi pada tahun 2015 adalah sebanyak 37,20%, dan tahun 2016 menjadi 42%. Terjadi peningkatan dari tahun 2015 didukung oleh realisasi program pembinaan, fasilitasi yang dilakukan terhadap SMK yang terakreditasi untuk meningkatkan capaiannya.

TUJUAN 5.3 : MENINGKATKAN DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT

Tujuan ketiga pada misi 5 ini memiliki satu sasaran strategis Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan, sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.3.1

Meningkatkan Akses Dan Mutu Pelayanan Kesehatan

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.3.1 terdiri atas 3 (tiga) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.3.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Angka Harapan Hidup	72,36 tahun	73,13 tahun	101%
2	Puskesmas yang terakreditasi	2	2	100%
3	Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	81%	85%	104%
Rata-rata Capaian Indikator				101%



Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 3 (tiga) indikator kinerja sasaran strategis sebesar 101%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan pencapaian sasaran Strategis termasuk kategori **sangat baik**.

1. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup	=	Rata-rata jumlah tahun kehidupan yang masih dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur 73,36 tahun
----------------------------	----------	--

Salah satu indikator utama untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat adalah angka harapan hidup. Indikator ini menjadi salah satu indikator utama dari sasaran strategis meningkatkan akses dan mutu layanan kesehatan.

Pada tahun 2016 ditetapkan target angka harapan hidup Kota Bukittinggi 72,36 tahun dan berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bukittinggi, angka harapan hidup Kota Bukittinggi mencapai 73,13 tahun dan menjadi salah satu variabel Indeks Pembangunan Manusia. Realisasi ini melampaui target dengan tingkat capaian 101%.

Pencapaian angka harapan hidup merupakan dampak dari berbagai kinerja bidang kesehatan, seperti; tingkat kematian ibu melahirkan dan bayi baru lahir, angka kesakitan dan pemenuhan gizi masyarakat. Program ini dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi beserta seluruh instansi dan lembaga kesehatan tingkat kota hingga kelurahan. Tugas ini juga menjadi bagian penting partisipasi masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat melalui berbagai program di tingkat kelurahan, dasa wisma pos yandu dan kader kesehatan.

Angka Harapan Hidup Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 71,98 tahun, dan tahun 2016 meningkat menjadi 73,36 tahun. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya derajat kesehatan masyarakat melalui program preventif dan kuratif serta perilaku hidup bersih dan sehat yang semakin baik.



2. Puskesmas Yang Terakreditasi

Puskesmas terakreditasi yang = Jumlah puskesmas yang terakreditasi berjumlah 2 puskesmas

Puskesmas terakreditasi menunjukkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Sebagai unit layanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar, puskesmas tidak hanya memberikan layanan kuratif, tetapi juga preventif dan berperan penting dalam mewujudkan masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat.

Pada tahun 2016, ditargetkan 2 puskesmas Kota Bukittinggi terakreditasi, dan terealisasi keduanya. Puskesmas tersebut adalah puskesmas Guguk Panjang dan puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad, dengan nilai Utama untuk Puskesmas Guguk Panjang dan Madya untuk puskesmas Perkotaan Rasimah Ahmad berdasarkan keputusan tim asesor akreditasi Kementerian Kesehatan.

Dengan terakreditasi, maka puskesmas sesuai kriteria penilaiannya berarti sudah memenuhi standar mutu :

1. Administrasi Manajemen
2. Upaya Kesehatan Perorangan
3. Upaya Kesehatan Masyarakat

Menjadi tugas penting bagi Dinas Kesehatan bersama puskesmas itu sendiri untuk memenuhi kriteria dan indikator puskesmas terakreditasi dimaksud. Hal ini dilakukan melalui berbagai program seperti Program usaha kesehatan masyarakat, program promosi kesehatan, program perbaikan gizi masyarakat dan program penunjang kesehatan lainnya.

Pada tahun 2015 Puskesmas yang terakreditasi di Bukittinggi masih belum ada (0), sementara tahun 2016 puskesmas yang terakreditasi sebanyak 2 puskesmas. Pencapaian ini didukung program pembinaan puskesmas yang diorientasikan untuk pemenuhan akreditasi puskesmas pada Dinas Kesehatan Bukittinggi.



3. Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat

$$\begin{array}{l} \text{Cakupan Jaminan} \\ \text{Layanan Kesehatan} \\ \text{Masyarakat} \end{array} = \frac{\text{Jumlah penduduk peserta} \\ \text{jaminan kesehatan di satu} \\ \text{wilayah pada kurun waktu} \\ \text{tertentu 99.803}}{\text{Jumlah penduduk di satu} \\ \text{wilayah pada kurun waktu} \\ \text{yang sama 117.378}} \times 100\% = 85\%$$

Pemerintah telah menargetkan universal coverage layanan kesehatan 100% pada tahun 2019 Kota Bukittinggi menargetkan pada tahun 2016 cakupan jaminan layanan kesehatan masyarakat sebanyak 81%. Pada akhir tahun 2016, cakupan jaminan layanan kesehatan masyarakat ini terealisasi 85% atau dengan tingkat capaian 104%.

Peningkatan cakupan jaminan kesehatan masyarakat Bukittinggi diupayakan melalui program nasional Jaminan Kesehatan Masyarakat yang bersumber dari APBN, dengan jumlah kepesertaan sebanyak 16.295 orang. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga bekerja sama dengan pemerintah kabupaten kota dalam program Jaminan Kesehatan Daerah Sakato, yang merupakan sharing dana antara pemerintah provinsi dengan kabupaten dan kota drngan komposisi 40% dan 60%. Program ini menanggung jaminan kepesertaan sebanyak 9.532 orang. Kedua program merupakan jaminan pelayanan kesehatan untuk masyarakat miskin, sesuai data yang diterbitkan oleh Tin Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dalam Basis Data Terpadu.

Kedua program ini menjamin 85% masyarakat Kota Bukittinggi melalui BPJS. Selanjutnya jaminan pelayanan kesehatan juga berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dan keluarga melalui BPJS, ABRI dan POLRI serta pekerja pada perusahaan. Secara mandiri masyarakat juga didorong dan difasilitasi sebagai peserta jminan kesehatan sesuai pilihan dan kemampuan masing-masing.

Pelaksanaan program ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi beserta seluruh instansi dan lembaga terkait. Dengan jaminan layanan kesehatan ini, seluruh masyarakat yang ikut dlam kepesertaan mendapat jaminan layanan kesehatan mulai dari tingkat dasar, hingga tindakan rujukan sesuai pertanggung yang diberikan.



Beberapa program dan kegiatan dalam mendukung pencapaian indikator kinerja utama ini pada Dinas Kesehatan antara lain melalui program Jaminan kesehatan masyarakat dan program Standarisasi pelayanan Kesehatan.

Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat berupa kepesertaan jaminan kesehatan, baik BPJS ataupun jaminan lainnya adalah sebesar 71% pada tahun 2015. Sementara tahun 2016 cakupannya sudah mencapai 85%. Selain dukungan fasilitasi bagi masyarakat kurang mampu oleh pemerintah, kepesertaan secara mandiri juga semakin meningkat dengan kerjasama seluruh instansi dan lembaga kesehatan.

TUJUAN 5.4 : MENINGKATNYA KUALITAS HIDUP MASYARAKAT

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.4.1
Meningkatnya Kualitas Penduduk
Pembangunan Keluarga, Pengarusutamaan
Gender Dan Perlindungan Anak

Indikator Kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.4.1 terdiri atas 4 (empat) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN 5.4.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,71%	1,71%	100
2	Tingkat Kemiskinan	4,23	5.46	71
3	Indeks Pemberdayaan gender	70,48%	91%	129



No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
4	Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	80%	92%	115
Rata-rata capaian				103%

Dari tabel dapat dilihat, rata-rata capaian 4 (empat) indikator kinerja sasaran strategis 5.4.1 sebesar 103%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan sasaran ini termasuk kategori **sangat baik**.

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk = Rata-rata pertumbuhan penduduk tiap tahunnya 1,71 %

Laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi masih termasuk tinggi, karena berada di atas rata-rata nasional dan provinsi. Karena itu, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menerbitkan Grand Disain Kependudukan dalam bentuk Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 25 Tahun 2015 Tentang Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Kota Bukittinggi Tahun 2010 - 2035 Berdasarkan peraturan ini dirumuskan target laju pertumbuhan penduduk hingga terjadi penurunan signifikan di tahun 2035 beserta strategi yang perlu dirumuskan dalam bentuk program kerjaseluruh SKPD dan lembaga terkait lainnya di tingkat kota.

Target laju pertumbuhan penduduk ini diadopsi dalam RPJMD Kota Bukittinggi Tahun 2016 – 2021 dan ditetapkan target laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 sebesar 1,71%. Sesuai target dimaksud, pada tahun 2016, laju pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggi mencapai 1,71% sesuai data dari Badan Pusat Statistik (BPS) thn 2016

Karena Kota Bukittinggi merupakan kota perdagangan dan jasa serta kota pelayanan, maka pertumbuhan penduduk Kota Bukittinggitidak



hanya dipengaruhi oleh tingkat kelahiran, melainkan juga sangat dipengaruhi urbanisasi. Karena itu program Pemerintah Kota Bukittinggi untuk mengedalikan laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2016 adalah:

1. Pengaturan Fertilitas
2. Penurunan Mortalitas
3. Pengarahan Mobilitas

Mendukung pencapaian program tersebut dilakukan promosi kependudukan dan KB di media radio, talk show, liputan TV dan mobil penerangan KB serta manunggal KB bersama mitra. Pelaksanaan pelayanan KB secara serentak bersama mitra, juga menjadi bagian penting untuk mendukung kesuksesan program KB, dengan melaksanakan pendataan keluarga oleh petugas pendataan keluarga terlatih untuk mendapatkan data akurat, sehingga langsung menyisir peserta yang tepat.

Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah 1,77%, sementara tahun 2016 adalah 1,71%. Dengan demikian terjadi penurunan karena berbagai program pendukung dapat dilakukan dengan baik.

2. Tingkat Kemiskinan

$$\text{Tingkat Kemiskinan} = \frac{\text{Jumlah penduduk kriteria miskin berjumlah } 6.423}{\text{Jumlah penduduk } 117.378 \text{ jiwa}} \times 100\% = 5,46$$

Tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi relatif rendah, dan berada di bawah rata-rata nasional dan Provinsi Sumatera Barat. Namun demikian potensi penduduk miskin juga relatif besar, karena itu program ini menjadi prioritas dan termasuk salah satu indikator kinerja utama Pemerintah Kota Bukittinggi.

Tahun 2016 ditargetkan tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi sebesar 4,23%, dan terus menurun hingga akhir masa RPJMD. Realisasinya berdasarkan data yang dipublikasikan oleh BPS Kota Bukittinggi tahun 2016 tingkat kemiskinan Kota Bukittinggi adalah 5,46%. Realisasi ini, menyebabkan capaian indikator kinerja ini sebesar 70%.



Program Penanggulangan Kemiskinan Kota Bukittinggi merupakan program bersama seluruh SKPD dan lembaga serta instansi teknis yang ada di daerah dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang diketuai oleh Wakil Walikota Bukittinggi sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri. Program penanggulangan kemiskinan tersebut termuat dalam Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD) yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bukittinggi.

Seluruh program penanggulangan kemiskinan di daerah yang dilaksanakan oleh seluruh SKPD dan lembaga ataupun instansi pemerintah yang ada di Bukittinggi mesti mengacu pada peraturan tersebut, sementara intervensi masyarakat miskinnya berdasarkan Basis Data Terpadu yang diterbitkan oleh TNP2K.

Pelaksanaan program ini masih harus ditingkatkan efektifitasnya, sehingga masyarakat miskin yang menjadi sasaran secara terukur dapat keluar dari kelompok masyarakat miskin. Keterlibatan dunia usaha melalui penyaluran dana tanggung jawab sosialnya juga diupayakan sesuai rumusan strategi tadi.

Tingkat Kemiskinan tahun 2015 adalah 4,58%, dan tahun 2016 tercatat 5,46%, karena berbagai program penanggulangan kemiskinan belum efektif, dan terjadinya urban ke Bukittinggi yang relatif tinggi.

3. Indeks Pemberdayaan Gender

Indek Pemberdayaan gender	=	Jumlah angka keterwakilan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja mencapai 99,21%
----------------------------------	---	---

Pada tahun 2016 telah ditargetkan Indeks Pemberdayaan Gender yang akan dicapai Kota Bukittinggi sebesar 70,48%. Indeks ini dihitung berdasarkan keterwakilan perempuan di parlemen (DPRD) Kota Bukittinggi, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja.

Berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada tahun 2016 indeks pemberdayaan gender Kota Bukittinggi mencapai 99,21%, atau dengan capaian 115%. Pencapaian ini didukung beberapa program pada Kantor



Pemberdayaan Perempuan dan KB, seperti Bimtek perencanaan dan penganggaran responsif gender (PPRG), pembinaan dibidang pemasaran melalui pameran produksi dan pelatihan, serta pembinaan organisasi perempuan terkait program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Indeks Pemberdayaan gender Bukittinggi tahun 2015 adalah 68,84%, dan tahun 2016 mencapai 99,21% dari data pendukung yang ada, sambil menunggu rilis terbaru dari Kementerian PPA.

Acara Pemilihan Duta Gender Kota Bukittinggi



4. Capaian PMKS Yang Mendapat Perlindungan Sosial Dalam Usaha Meningkatkan Kualitas Penduduk

$$\text{Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk} = \frac{\text{Jumlah PMKS KIS dan Jamkesda 22.736 jiwa}}{\text{Jumlah PMKS 20.310 jiwa}} \times 100\% = 112\%$$

Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk sebanyak 91%. Penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat perlindungan adalah PMKS yang menurut keadaannya tidak mungkin diberdayakan dengan berbagai keterbatasan. PMKS dalam hal ini seperti Raskin, PKH, KIS, dan Jamkesda.



Pada tahun 2016 di Bukittinggi yang termasuk dalam kriteria ini ada sebanyak 20.310 jiwa dan ditargetkan 80%, dan ditargetkan sebanyak 80% diberikan perlindungan.

Melalui program yang ada di Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Bukittinggi jumlah PMKS yang mendapat perlindungan sebanyak 22.736 jiwa dari atau terealisasi 112%. Perlindungan sosial yang diberikan dalam bentuk jaminan layanan kehidupan (KIS) jaminan kesehatan.

Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk tahun 2015 adalah sebesar 80%, dan tahun 2016 terealisasi 112%. Hal ini terjadi karena dukungan program ini sudah dimiliki oleh penyandang masalah sosial, dan diantaranya juga mendapat program lainnya yang relevan.

TUJUAN 5.5 : MEWUJUDKAN PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA YANG BERDAYA SAING

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.5.1

Meningkatnya Nilai Tambah Sektor Perdagangan

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.5.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum, pada tabel :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.5.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	2.338	1.844	78%



No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
	Rata-rata capaian			78%

Dari Tabel Dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5.5.1 sebesar 78%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan sasaran ini termasuk kategori **baik**.

1. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran

Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran = Nilai PDRB atas harga berlaku lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan motor 1.844.000.000

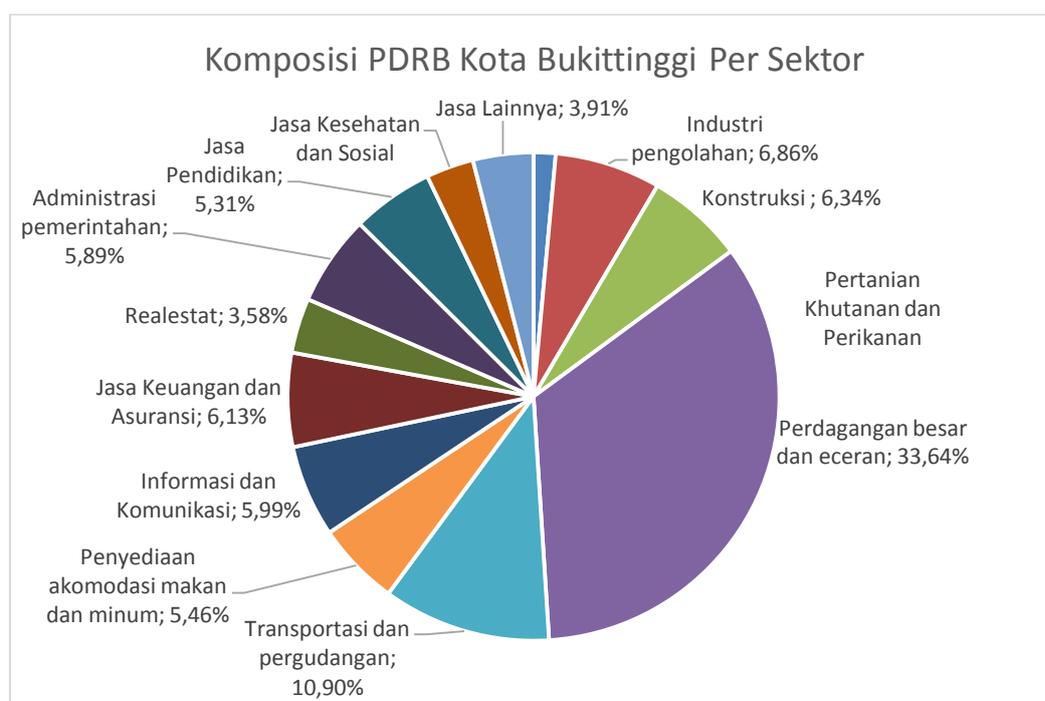
Pertumbuhan PDRB sektor perdagangan dan jasa merupakan salah satu indikator utama yang dijadikan untuk mengukur capaian sasaran strategis meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan adalah pertumbuhan PDRB Perdagangan besar besar dan eceran. Sektor ini meliputi penjualan tanpa perubahan teknis dari berbagai jenis barang, dan memberikan imbalan jasa yang mengiringi penjualan barang-barang tersebut. Baik penjualan secara grosir (perdagangan besar) maupun eceran merupakan tahap akhir dalam pendistribusian barang dagangan. Kategori ini juga mencakup reparasi mobil dan sepeda motor.

Pada tahun 2016 pertumbuhan sektor ini ditargetkan sebesar 2.338.000.000 dan terealisasi sebesar 1.844.000.000,-

Perekonomian Kota Bukittinggi pada tahun 2015 mengalami perlambatan dibandingkan pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kota Bukittinggi tahun 2015 sebesar 6,12 persen, sedangkan tahun 2014 mencapai 6,18 persen. Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum. Selanjutnya, lapangan usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial tumbuh sebesar 8,19 persen, Informasi dan Komunikasi sebesar



8,03 persen, Transportasi dan Pergudangan sebesar 7,43 persen, Jasa Pendidikan sebesar 7,42 persen, Jasa Lainnya sebesar 6,62 persen, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 6,42 persen, Konstruksi sebesar 6,00 persen, Real Estate 5,27 persen, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 4,63 persen, Jasa Perusahaan sebesar 4,32 persen, Jasa Keuangan dan Asuransi 3, 93 persen, Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 3,91 Industri Pengolahan sebesar 3,09 persen, Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 2,62 persen, Pengadaan Air dan Gas sebesar 1,97 persen, dan Pertambangan dan Penggalian -0,53 persen.



Dari sektor pendukung ekonomi Kota Bukittinggi, maka Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mengalami pertumbuhan sebesar 6,42 persen. Dari rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Bukittinggi sebesar 6,12%, pertumbuhan sektor ini lebih tinggi dari rata-rata, namun belum tertinggi. Sementara dari kontribusi, sektor ini berkontribusi 33,64%, dan merupakan penyumbang terbesar dari ekonomi Kota Bukittinggi.

Menjadikan sektor ini sebagai indikator utama untuk mengukur ekonomi Kota Bukittinggi merupakan hal penting dan signifikan.



Dengan pertumbuhan yang signifikan, juga akan berdampak signifikan kepada masyarakat. Sementara sektor ini juga menyentuh sebagian besar masyarakat, yang basis ekonominya berada pada sektor ini.

Pertumbuhan ekonomi sektor ini didukung dengan beberapa program dan kegiatan yang ada di Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan, Dinas Pasar dan BP2TPM. Hal yang dilakukan sebagai upaya pencapaian target ini meliputi pembinaan, pengawasan, mengikuti pasar lelang, dan mengikuti event pameran dalam negeri.

Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran di Bukittinggi tahun 2015 tercatat sebesar Rp. 1.844.000.000, dan tahun 2016 juga terealisasi sama, karena BPS Kota Bukittinggi belum mempublikasi data tahun 2016.

TUJUAN 5.6 : MENINGKATKAN PENGANEKARAGAMAN KONSUMSI PANGAN DAN GIZI

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.6.1
Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat Yang Bergizi, Beragama, Seimbang Dan Aman Berbasis Sumberdaya Lokal

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.6.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum, pada tabel :



Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.6.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Skor pola pangan harapan (PPH)	84,1%	83,9%	99,7%
Rata-rata capaian				99,7%

Dari Tabel Dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5.6.1 sebesar 99,7%. Sesuai dengan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan sasaran ini termasuk kategori **sangat baik**.

1. Skor pola pangan harapan (PPH)

Realisasi indikator kinerja Skor pola pangan harapan (PPH) yang tersedia berdasarkan pemenuhan energi dan gizi sebagai berikut:

Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	=	Total ketersediaan variasi pangan berdasarkan pemenuhan energi dan gizi sebesar 83,9%
---------------------------------------	---	--

Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan ini didukung beberapa program berupa bantuan bibit tanaman sayur-sayuran, buah-buahan kepada masyarakat. Untuk memotivasi masyarakat, pemerintah lomba cipta menu untuk 24 PKK kelurahan dengan tema olahan non beras non terigu dan fokus pada olahan pangan lokal, melakukan promosi untuk penganekaragaman konsumsi pangan melalui leaflet, banner, baliho, sticker, mengikuti pameran produk makanan olahan dengan menampilkan produk makanan olahan non beras non terigu yang dihasilkan kelompok binaan dan masyarakat Kota Bukittinggi. Selanjutnya untuk mengevaluasi capaian target kinerja ini dilakukan survei terdapat keberagaman pola konsumsi masyarakat kota Bukittinggi secara reguler, dan langsung disikapi untuk memacu capaian. Penanaman budaya juga dilakukan sejak dini melalui penyuluhan kepada anak sekolah pentingnya menu beragam, bergizi seimbang, aman dan halal, yang harus diterapkan dalam keseharian.



Skor pola pangan harapan (PPH) Kota Bukittinggi tahun 2015 adalah sebesar 83,50%, dan tahun 2016 juga sama, karena belum ada publikasi data terbaru dari BPS.

TUJUAN 5.7 : MENINGKATKAN KETERTIBAN, KETENTRAMAN DAN KEAMANAN KOTA

Untuk mencapai tujuan tersebut hasil yang akan dicapai telah ditetapkan dalam sasaran strategis sebagai berikut :



SASARAN STRATEGIS 5.7.1

Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, Ketentraman Dan Keamanan Masyarakat

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis 5.7.1 terdiri atas 1 (satu) indikator kinerja utama, dengan capaian kinerja sebagaimana tercantum, pada tabel :

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5.7.1

No	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	650 kasus	657 kasus	101%
Rata-rata capaian				101%

Dari Tabel Dapat dilihat, rata-rata capaian 1 (satu) indikator kinerja sasaran strategis 5.7.1 sebesar 101%. Sesuai dengan ketegori penilaian



keberhasilan/kegagalan yang ditetapkan, keberhasilan sasaran ini termasuk kategori **sangat baik**.

1. Jumlah Kasus Pelanggaran Gangguan Ketertiban, Ketentraman Dan Keamanan Masyarakat Yang Tertangani

Realisasi indikator kinerja Jumlah sarana UMKM dihitung sebagai berikut:

Jumlah pelanggaran Ketertiban, dan masyarakat tertangani	kasus gangguan ketentraman dan keamanan yang	=	Jumlah kasus pelanggaran gangguan, ketertiban, ketentraman, dan keamanan masyarakat yang tertangani sebanyak 657 kasus
---	---	----------	---

Pada tahun 2016, terjadi peningkatan kasus pelanggaran gangguan ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani, menjadi 657 kasus. Sementara itu, target yang ditetapkan pada tahun 2016 adalah sebanyak 650 kasus. Dengan demikian capaiannya sebesar 101%.

Peningkatan capaian ini merupakan salah satu wujud dan komitmen Walikota Bukittinggi yang mengangkat visi Bukittinggi sebagai Kota Wisata. Sebuah Kota Wisata butuh jaminan kepada pengunjung untuk menghadirkan suasana yang aman, nyaman, tenteram dan menyenangkan. Karena itu diawal kepemimpinan Walikota dan Wakil Walikota Bukittinggi periode 2016-2020 dibentuk Satuan Kerja Keamanan dan Ketertiban Kota (SK4) melibatkan seluruh SKPD, lembaga dan instansi terkait tingkat kota.

Tim SK4 Kota Bukittinggi, melakukan patroli intensif secara rutin, sehingga pelanggaran Perda dapat ditangani dan diminimalisir. Tim ini juga mengawasi berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban umum pada objek-objek wisata dan area publik lainnya. Beberapa bentuk pengamanan yang dilakukan seperti:

1. Operasi dan Pengawasan Objek-objek Wisata
2. Operasi dan Pengawasan Penyakit Masyarakat



3. Operasi dan Pengawasan Perparkiran dan Terminal
4. Operasi dan Pengawasan Pedagang Kaki Lima dan Pasar

Pada Pemerintah Kota Bukittinggi, tugas ini mejadi tugas pokok dan fungsi dari Pol PP Kota Bukittinggi, dengan melibatkan seluruh unsur terkait. Komitmen Walikota Bukittinggi terlihat dari dukungan anggaran, personil, regulasi dan evaluasi berkala yang langsung dihadiri oleh Walikota Bukittinggi dan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani tahun 2015 adalah sebanyak 722 kasus, dan tahun 2016 tercapai 657 kasus. Hal ini menunjukkan terjadinya penurunan kasus, semetara kasus yang ada dapat ditangani.

BAB 4

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

Pencapaian visi dan misi Pemerintah Kota Bukittinggi yang termuat dalam RPJMD Kota Bukittinggi tahun 2016-2021 merupakan tanggung jawab seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Daerah Kota Bukittinggi yang telah dituangkan pada Renstra masing-masing SKPD dalam menyelenggarakan pembangunan daerah. Pembangunan tersebut merupakan pelaksanaan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk merealisasikan pembangunan tersebut, Pemerintah Kota Bukittinggi telah menetapkan target kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi dalam suatu penetapan kinerja Pemerintah Kota Bukittinggi yang memuat sasaran strategis dan indikator sasaran untuk mengukur pencapaiannya. LKIP Pemerintah Kota Bukittinggi pada hakekatnya merupakan hasil dari pencapaian kinerja SKPD dalam mencapai sasaran berdasarkan program dan kegiatan pendukungnya yang dianggarkan dalam APBD Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016.

Pencapaian kinerja sasaran selama tahun anggaran 2016 umumnya dapat dicapai sesuai target kinerja yang ditetapkan. Hal ini dapat diwujudkan karena program dan kegiatan yang dilaksanakan mendukung pencapaian sasaran strategis dan dapat dilaksanakan sesuai target kinerja.

Capaian kinerja yang belum atau kurang memenuhi target disebabkan antara lain kurang sesuainya data yang tersedia dibandingkan dengan data yang dibutuhkan dalam indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD, perubahan kebijakan atau aturan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Beberapa persoalan yang ditemui dalam mewujudkan kinerja sasaran umumnya berkaitan dengan persoalan kebijakan teknis dari pemerintah, keterbatasan sumber dana dan SDM serta hal lainnya diluar perkiraan sebelumnya.

Untuk masa yang akan datang perlu kiranya diambil langkah-langkah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan antara lain : meningkatkan



koordinasi lintas SKPD dalam penyusunan program perencanaan, peningkatan wawasan dan SDM aparatur melalui bimbingan teknis dan sosialisasi terkait peraturan perundang-undangan maupun dalam hal penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan.

Kita berharap dengan semakin lengkapnya data yang tersedia dan semakin pahamnya aparatur terhadap aturan, kebijakan dan regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah, maka pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sesuai visi dan misi pemerintah dan memberikan dampak yang baik bagi kesejahteraan masyarakat.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bukittinggi Tahun 2016 ini dibuat sebagai perwujudan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja.

Bukittinggi, Maret 2017
WALIKOTA BUKITTINGGI

Dto

M. RAMLAN NURMATIAS, SH

LAMPIRAN



HASIL PENGUKURAN PENETAPAN KINERJA PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
1	Meningkatnya pembangunan fisik yang merupakan hasil keterpaduan antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat	1.1 Jumlah pembangunan fisik yang dilaksanakan dengan melibatkan swadaya masyarakat dengan semangat gotong royong .	jml	72	70	97
		1.2 Perusahaan /dunia Usaha yang berpartisipasi membiayai Program Pemerintah Daerah melalui Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan	%	70	60	85
2	Meningkatnya event generasi muda dalam pemberdayaan kesenian, adat dan budaya	2.1 Event kesenian, adat dan budaya bagi generasi muda/kepemud aan	jml	52	52	100
		2.2 Sanggar seni yang aktif	jml	7	8	114
3	Meningkatnya event olahraga generasi muda	3.1 Jumlah Event keolahragaan bagi generasi muda / Kepemudaan	jml	6	7	116



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
4	Meningkatnya fungsi rumah ibadah	4.1 Kelompok/orga nisasi Remaja Mesjid yang aktif dalam bidang keagamaan	jml	3	4	133
		4.2 Jumlah Event keagamaan	jml	3	3	100
5	Meningkatnya kapabilitas dan akuntabilitas lembaga pemerintahan	5.1 % pegawai yang memiliki kompetensi sesuai jabatan	%	50	63,65	127
		5.2 Capaian kinerja daerah (LPPD, SAKIP)	Nilai	LPPD Rangking 65, LKIP C	63 CC	96 150
		5.4 % capaian program pembentukan peraturan daerah	%	19	13	68
6	Terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN	6.1 Opini BPK terhadap laporan keuangan daerah	WTP	WTP	WTP	100
7	Terpenuhinya RTH Kota	7.1 % RTH Publik	%	8	8	100
8	Pemenuhan target universal access (sanitasi, air bersih dan permukiman)	8.1 % air minum layak	%	93	78	83
		8.2 % sanitasi layak	%	95	72,72	76
9	Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang Kota	9.1 Kesesuaian pemanfaatan ruang kota	%	55	85	154



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
		9.2 Pelanggaran pemanfaatan tata ruang yang dapat ditertibkan	%	50	59	118
10	Meningkatkan pelestarian benda cagar budaya (BCB)	10.1 Benda cagar budaya yang lestari	%	5	6	120
11	Meningkatkan Pembangunan dan pengembangan bangunan bersejarah, adat dan agama	11.1 Jumlah Penambahan pembenahan bangunan bernilai sejarah, adat, budaya dan agama	jml	1	1	100
12	Terciptanya keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran berlalu lintas	12.1 Cakupan Daerah yang terlayani angkutan umum	%	81	100	123
		12.2 Fasilitas Keselamatan Jalan	%	71	70	98
		12.3 Jalan berkondisi baik	%	86	85,67	99,6
13	Meningkatnya kesiapsiagaan lembaga pemerintahan dan masyarakat dan terhadap bencana	13.1 Fasilitas kebencanaan	%	60	71	118
14	Berkembangnya koperasi	14.1 Jumlah Koperasi sehat	Jml	12	13	108
15	Berkembangnya usaha mikro	15.1 Jumlah usaha mikro yang naik kelas menjadi usaha Kecil	Jml	5	5	100



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
16	Berkembangnya investasi	16.1 Jumlah Investasi	Rp Triliun	1.884	1.771	93
17	Berkembangnya Industri Kecil Menengah	17.1 Jumlah Industri Kecil Menengah yang berkembang (tenaga kerja, modal dan Produksi)	jml	5	5	100
18	Meningkatnya lapangan kerja	18.1 Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,84	6,04	96,5
19	Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	19.1 Jumlah penerimaan pajak daerah	Rp	34.758.80 4.463	30.709.69 0.231	88
20	Meningkatnya kunjungan wisatawan	20.1 jumlah kunjungan wisatawan	Jml	483.950	499.806	103
21	Meningkatkan mutu pendidikan	21.1 Harapan lama sekolah	Tahun	14,7	14,92	79
		21.2 Angka Rata Rata Lama Sekolah	Tahun	10,85	10,79	99
		21.3 APK PAUD (3 – 6 TH)	%	86,00	79	91
		21.4 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SD	%	72,88	79	108
		21.5 % Sekolah yang berakreditasi A tingkat SMP	%	54,50	73	135
		21.6 % Sekolah yang berakreditasi A	%	63,60	82	130



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
		tingkat SMA				
		21.7 % Kompetensi keahian yang berakreditasi A tingkat SMK	%	37,20	42	113
22	Meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan	22.1 Angka Harapan Hidup	Tahun	72,36	73,13	101
		22.2 Puskesmas yang terakreditasi	Jml	2	2	100
		22.3 Cakupan Jaminan Layanan Kesehatan Masyarakat	%	81	85	104
23	Meningkatnya kualitas penduduk pembangunan keluarga, pengarsutamaan gender dan perlindungan anak	23.1 Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,71	1,71	100
		23.2 Tingkat Kemiskinan	%	4,23	5,46	71
		23.3 Indek Pemberdayaan gender	%	70,84	91	129
		23.4 Capaian PMKS yang mendapat Perlindungan Sosial dalam usaha meningkatkan kualitas penduduk.	%	80	112	140
24	Meningkatnya nilai tambah sektor perdagangan	24.1 Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran	Rp Triliun	2.338	1.844	78
25	Meningkatnya konsumsi pangan masyarakat yang bergizi, beragam, seimbang dan aman berbasis sumberdaya lokal	25.1 Skor pola pangan harapan (PPH)	%	84,1	83,9	99,7



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%
26	Meningkatnya Jumlah Penanganan Gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat	26.1 Jumlah kasus pelanggaran gangguan Ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat yang tertangani	Kasus	650	657	101
Rata-rata						105%